



**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO  
2021 - 2026**



Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Sidoarjo  
Jl. Sultan Agung No. 19 Kel. Magersari – Sidoarjo  
Sidoarjo 61211  
Telp. (031) 895 3200  
E-mail : [bpbd@sidoarjokab.go.id](mailto:bpbd@sidoarjokab.go.id)

## KATA PENGANTAR

---

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) memiliki kewajiban untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, dasar hukum penyusunan Rencana Strategis ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. BPBD Kabupaten Sidoarjo adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban amanah dan tugas-tugas penanggulangan bencana sekaligus aksi-aksi kemanusiaan baik dalam upaya pengurangan risiko bencana, tindakan saat tanggap darurat serta program / kegiatan pada masa pemulihan pasca bencana.

Dengan dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidoarjo ini dapat dijadikan pedoman dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Sidoarjo, April 2022

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Sidoarjo



**Ir. DWIDJO PRAWITO, M. MT.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196510121992021001

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN SIDOARJO .....	12
2.1 TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI.....	12
2.3 KINERJA PELAYANAN .....	33
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo .....	41
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD KABUPATEN SIDOARJO .....	50
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	50
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	69
3.3 TELAHAAN RENSTRA.....	70
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	72
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	78
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	81
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	85
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	87
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	135
PENUTUP.....	137

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Sidoarjo.....	23
Tabel 2. Pegawai ASN BPBD Kab. Sidoarjo Menurut Gol. Ruang & Pendidikan ....	25
Tabel 3. Pegawai THL BPBD Kab. Sidoarjo Menurut Jabatan & Pendidikan .....	27
Tabel 4. Jumlah Peralatan Operasional Kebencanaan BPBD Kab. Sidoarjo.....	31
Tabel 5. Data Pos PMK sampai dengan tahun 2021 .....	32
Tabel 6. Data Inventaris Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	32
Tabel 7. Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan BPBD.....	34
Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	38
Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo .....	39
Tabel 10. Hasil Perhitungan dan Pengukuran Analisis TOWS .....	47
Tabel 11. Kondisi Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo.....	50
Tabel 12. Jumlah Penduduk dan luasan per Kecamatan.....	58
Tabel 13. Waktu Tempuh Berdasarkan Jarak Jangkauan.....	62
Tabel 14. Luas Wilayah Berdasarkan Kondisi Air (Ha).....	63
Tabel 15. Jumlah Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.....	66
Tabel 16. Sektor di Kabupaten Sidoarjo .....	67
Tabel 17. Capaian Sasaran Renstra.....	70
Tabel 18. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo .....	72
Tabel 19. Telaah Kajian Lingkungan Strategis Kabupaten Sidoarjo .....	74
Tabel 20. <b>Tujuan</b> (indikator dan target tujuan) dan <b>Sasaran</b> (indikator dan target sasarn) RENSTRA BPBD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 .....	81
Tabel 21. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Sidoarjo .....	86
Tabel 22. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2026 .....	88
Tabel 23. Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	136

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1. Keterkaitan RPJMD dan Renstra OPD.....	2
Gambar 2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo.....	23
Gambar 3. Diagram Hasil Analisis TOWS (SWOT).....	48
Gambar 4. Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Sidoarjo (Kajian Tahun 2015).....	57
Gambar 5. Peta Tingkat Kepadatan Penduduk.....	59
Gambar 6. Peta jangkauan Layanan Pos Pemadam Kebakaran .....	61
Gambar 7. Peta Ruas jalan .....	62
Gambar 8. Peta Sungai Kabupaten Sidoarjo.....	64
Gambar 9. Peta Jaringan Pipa PDAM Kabupaten Sidoarjo.....	64
Gambar 10. Peta Rencana Usulan WMK, Sektor dan Pos .....	65
Gambar 11. Peta Rencana Jangkauan Usulan WMK, Sektor dan Pos.....	66
Gambar 12. Identifikasi Permasalahan di BPBD.....	77
Gambar 13. Komponen Indek Resiko Bencana .....	79

## BAB I PENDAHULUAN

---

### 1.1 LATAR BELAKANG

---

Kabupaten Sidoarjo, menurut buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020 yang diterbitkan oleh BNPB adalah daerah rawan bencana dengan skor 78,89 dan termasuk dalam kelas risiko sedang dengan ancaman banjir, kebakaran dan puting beliung. Masih merujuk dalam dokumen yang sama (IRBI Tahun 2020), menurut tabel nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, Kabupaten Sidoarjo menempati urutan ke 38, dengan perkembangan yang secara konsisten mengalami penurunan nilai indeks risikonya mulai dari 149.60 (2015), 149.60 (2016), 132.02 (2017), 85.29 (2018), 81.62 (2019) dan 79.15 (2020) dengan kelas risiko sedang. Selain itu, Sidoarjo juga dikenal luas di seluruh pelosok negeri bahkan dunia dengan peristiwa atau kejadian bencana yang populer dengan sebutan 'Gempur Sidoarjo' atau 'Gempur (Lusi)' yang menunjukkan bahwa bencana dipandang dengan sebelah mata dan penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif, antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagaimana diamanatkan dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah. Rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagi seluruh OPD dalam menyusun rencana kerja OPD. Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disusun sesuai Tupoksi OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Perencanaan OPD

untuk periode satu tahun anggaran disebut Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambar 1. Keterkaitan RPJMD dan Renstra OPD



Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) menetapkan ketentuan umum mengenai Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Seiring diterbitkannya Undang-undang tersebut, maka acuan dan pegangan bagi Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan lebih berinteraksi, sinkron dan sinergis yang membawa konsekuensi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen-dokumen Rencana Pembangunan lainnya. Dalam penyusunan Rancangan

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidoarjo, salah satu dokumen rujukan awal yang digunakan adalah rancangan awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai perangkat daerah selama lima tahun baik untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dan rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya, Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan yang fokus dan terukur untuk mendukung terwujudnya layanan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.

Selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan dan ketentuan yang antara lain bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk membantu Bupati di dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana sebagai bentuk dukungan OPD di dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Sehubungan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai OPD pelaksana utama dan terdepan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana sudah seharusnya mempersiapkan tindakan penanggulangan bencana dalam Rencana Strategis (RENSTRA) untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tata nilai dan kearifan lokal dengan menggunakan semua potensi daerah. Renstra mencakup kebijakan dan program penanggulangan bencana sejak pencegahan yang bersifat komprehensif, penanganan tanggap darurat yang bersifat krisis dan tahap rekonstruksi yang berkesinambungan. Juga mengatur manajemen semua sumberdaya daerah termasuk perencanaan

dan pengelolaan anggaran serta pertanggung jawabannya, agar dapat dioptimalkan untuk penanggulangan bencana berbasis nilai – nilai lokal.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Sidoarjo diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan gender, non partisanyang berkeadilan yang melibatkan semua unsur dalam Pentahelix. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut, menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapibencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak. Sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus lapisan-lapisan masyarakat akar rumput. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Sidoarjo ini dirumuskan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai salah satu OPD serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan berfungsi sebagai tolok ukur penilaian pencapaian keberhasilan penanggulangan bencana daerah. Disamping mempunyai keterkaitan dengan RPJM dan

Renja, maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai keterkaitan dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam penyusunannya terutama pada penentuan visi sampai formulasi rencana tahunan harus melibatkan seluruh kajiandokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diambil tidak terlepas dari aturan dan pedoman yang terus mengalami perubahan yang lebih baik.

Sebagai sebuah dokumen, Renstra bukanlah sebuah dokumen statis, Renstra adalah dokumen dinamis yang pada suatu saat dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi dalam implementasi kebijakan / program penanggulangan bencana. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) memuat perencanaan jangka menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan untuk mendukung perencanaan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan optimal. Sebagai dokumen resmi untuk periode tertentu, Rencana Strategi BPBD juga memuat klarifikasi eksplisit atas visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang kemudian diterjemahkan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas BPBD beserta tolok ukur pencapaiannya. Dalam hal Penanggulangan Bencana, dengan merujuk pada dokumen Rencana Nasional (RENAS) Penanggulangan Bencana 2020 -2024, dinyatakan bahwa Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan B e r k e l a n D j e n g a n a d e m i k i a n A r a h K e b i j a k a n P e n y e l e n g g a r a a n P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a p e r i o d e 2 0 2 0 - 2 0 2 4 a d a l a h “ P e n i n g k a t a n K e t a n g g u h a n B e n c a n a M e n u j u K e s e j a h t e r a a n y a n g B e r k e t a h a n a n U n t u k P e m b a n g u n a n B e r k e l a n j u t a n ” .

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelamatan dan Pertolongan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran;
23. Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah;
24. Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
25. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019;
28. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
30. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
32. Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
34. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
35. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020 - 2024
36. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang/ Tata Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 3);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2025;
43. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 48)
44. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dan arah bagi BPBD Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan program dan anggaran kegiatan, dalam menjalankan amanah Visi, Misi dan atau RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten.
- b. Dasar Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sidoarjo
- c. Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten Sidoarjo dalam setiap program dan kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja kelembagaan.
- e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten Sidoarjo

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 bertujuan:

- a. Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis kelengkapan perangkat struktur organisasi dan informasi teknologi yang sinergis.
- b. Terciptanya program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo selama periode 2021-2026;
- c. Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) yang benar dan lengkap dalam struktur organisasi BPBD.
- d. Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo.
- e. Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan untuk mendukung upaya Penanggulangan bencana di kabupaten Sidoarjo.
- f. Terumuskannya analisis dan evaluasi kebijakan dan program / kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo yang dapat dijadikan bahan / materi formulasi program-program penanggulangan bencana yang lebih efektif dan akuntabel.
- g. Terwujudnya kolaborasi Pentahelix dan atau Hexahelix yang melibatkan *affected communities* (masyarakat terdampak) dalam menunjang keberhasilan implementasi program / kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN SIDOARJO</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

	<p>2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Sidoarjo</p> <p>2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo</p> <p>2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo</p>
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN &amp; ISU-ISU STRATEGIS BPBD KAB. SIDOARJO</b>
	<p>3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih</p> <p>3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra</p> <p>3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis</p>
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN SIDOARJO

---

### 2.1 TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

---

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tersebut dibuat Peraturan Bupati Sidoarjo mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2011. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, BPBD Kabupaten Sidoarjo mempunyai beberapa tugas, yaitu:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksisecara adil dan setara ;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
- e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana, kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki fungsi seperti yang sudah ditetapkan yaitu :

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

- a. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana , Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- c. Bidang-Bidang yang dipimpin kepala Bidang , terdiri dari :
  - 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - 2) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - 3) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Deskripsi Pemegang Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana mempunyai tugas sebagai komando, koordinator, pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana/memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan urusan perencanaan tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan program;
  - 2) koordinasi pelaksanaan tugas badan;
  - 3) pembinaan pelaksanaan program dan kinerja badan;
  - 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan;
  - 5) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
  - 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan. Untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi Sekretaris mempunyai fungsi:
    - 1) pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
    - 2) pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
    - 3) pengelolaan administrasi keuangan;
    - 4) pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada perangkat daerah;

- 5) pelaksanaan sub kegiatan keuangan, meliputi :
    - pelaksanaan administrasi keuangan;
    - pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
    - pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran;
    - penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
  - 6) pelaksanaan sub kegiatan perencanaan dan pelaporan, meliputi:
    - penyusunan program kerja badan;
    - pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan badan;
    - penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
    - pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah;
    - penyusunan laporan kinerja badan;
    - pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan
  - 7) pelaporan kinerja badan;
  - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  - 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  - 3) pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  - 4) pelaksanaan sub kegiatan penguatan kelembagaan bencana, meliputi :
    - menyusun rumusan kebijakan teknis Penguatan Kelembagaan Bencana;
    - melaksanakan kebijakan teknis Penguatan Kelembagaan Bencana;
    - menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada prabencana bidang pencegahan;

- mengumpulkan, mengolah, menganalisis data potensi bencana;
  - melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, kepada stakeholder/masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
- 1) pelaksanaan sub kegiatan pencegahan, meliputi :
- menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
  - menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
  - menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra bencana pengurangan resiko bencana;
  - menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  - menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  - menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
  - menyiapkan bahan pepaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerahmenyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi;
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) pelaksanaan sub kegiatan kesiapsiagaan, meliputi :
- menyusun rumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan;
  - melaksanakan kebijakan teknis kesiapsiagaan yang meliputi:
    - a) menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi kajian resiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi;
    - b) menyiapkan dan melaksanakan mitigasi bencana;

- c) menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
  - d) menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
  - e) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
  - f) menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
  - g) menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
  - h) menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana;
  - i) menyiapkan bahan fasilitasi di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
  - j) menyiapkan bahan evaluasi di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
  - menyusun dan memperbarui data kesiapsiagaan;
  - melaksanakan ketatausahaan Bidang dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
- 3) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- 4) monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- pelaporan kinerja bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBadan sesuai dengan tugasnya.
- d. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas :

- 1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- 4) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 5) pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 6) pelaksanaan sub kegiatan kedaruratan dan logistik, meliputi:
  - menyusun rumusan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik;
  - melaksanakan kebijakan kegiatan kedaruratan dan logistik;
  - menyusun dan memperbarui data kedaruratan dan logistik;
  - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik;
  - menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;

- menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan kerjasama di bidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan evaluasi di bidang dukungan logistik;
- menyusun program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- melaksanakan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- melaksanakan koordinasi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana dan transisi menuju pemulihan;
- melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana dan transisi menuju pemulihan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang.

7) pelaksanaan sub kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi:

- menyusun rumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- menyusun dan memperbaiki data rehabilitasi dan rekonstruksi;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;

- menyusun program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, melalui penyusunan dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - melaksanakan penanganan pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan;
  - melaksanakan penanganan pasca bencana melalui kegiatan rekonstruksi berupa pembangunan kembali sarana prasarana terdampak bencana;
  - melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 8) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 9) pelaporan kinerja bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

#### e. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang Pemadam Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 2) pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 3) pelaksana sub urusan pencegahan kebakaran, meliputi :
  - melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan;
  - melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
  - melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana proteksi kebakaran dan penyelamatan;

- melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik kapasitas teknis maupun manajemen;
- melakukan pembinaan dan pengawasan, penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat dan dunia usaha;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis Pencegahan Kebakaran;
- melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;

4) pelaksanaan sub kegiatan sarana prasarana, meliputi :

- menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standarisasi dan inventarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- menyelenggarakan pengadaan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan dan alat pelindung diri aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri

petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standarisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
- melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten;
- melakukan pemeliharaan system informasi kebakaran dan penyelamatan;
- melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis sarana prasarana;

5) pelaksanaan sub kegiatan pemadaman dan penyelamatan, meliputi :

- merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi

pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;

- menyelenggarakan operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran serta penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- menyelenggarakan layanan respon cepat (respon time) pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut;
- melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran

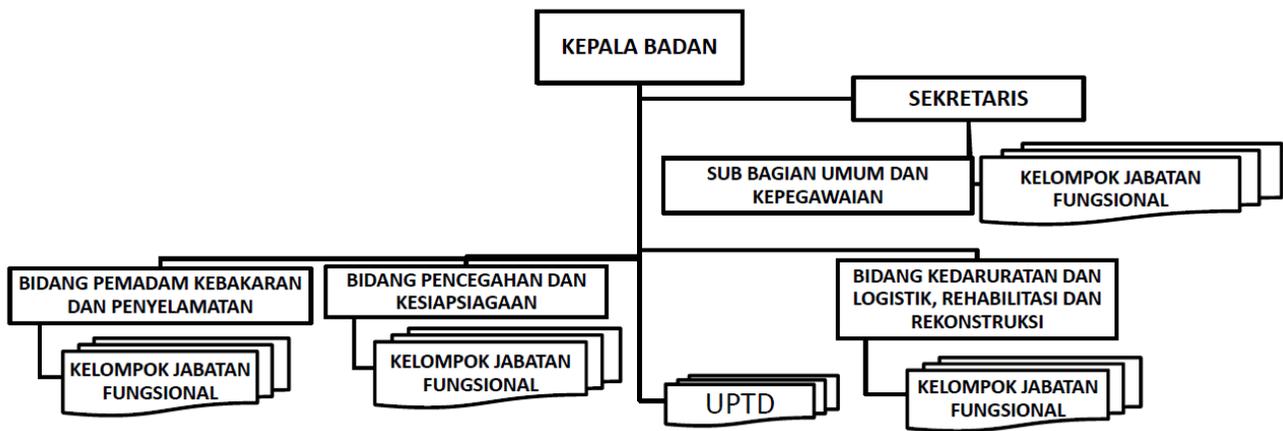
1) monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Pemadam Kebakaran;

2) pelaporan kinerja bidang;

3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengantugasnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian.



Gambar2 StrukturOrganisasBPBDKabupaterSidoarjo

## 2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset penting yang harus selalu ditingkatkan kualitasnya. Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan modal yang menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar pegawainya merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mencapai 294 orang, yang terdiri dari 73 orang Aparatur Sipil Negara dan 221 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel1. JumlahPegawaBPBDKabupaterSidoarjo

No	STATUS / POSISI	JUMLAH	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	73 Orang	24,8%
2	Tenaga Harian Lepas (THL)		
	2.1. Pengadministrasian Umum	8 Orang	
	2.2. Pengemudi	1 Orang	
	2.3. Pramu Kebersihan	5 Orang	
	2.4. Petugas Keamanan	15 Orang	
	2.5. Pengelola Kepegawaian	1 Orang	
	2.6. Pengelola Keuangan	2 Orang	

	2.7. Teknisi Peralatan dan Mesin	4 Orang	
	2.8. Pranata Pemadam Kebakaran	115 Orang	
	2.9. Pranata Penyelamat Bencana	30 Orang	
	2.10. Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	29 Orang	
	2.11 Pengelola Data (Pusdatin)	11 Orang	
Total THL		221 Orang	75,2%
Total Pegawai BPBD		294 Orang	100,00

Data di atas menunjukkan bahwa sekitar 24,8% SDM BPBD Kabupaten Sidoarjo berstatus ASN dan sisanya sekitar 75,2% merupakan Tenaga Harian Lepas (THL). Dari jumlah THL sebesar 175 orang, 79,2% adalah tenaga yang menjadi Pasukan Pemadam Kebakaran. Jumlah SDM BPBD Kabupaten Sidoarjo (PNS dan THL) yang mencapai sekitar 294 orang merupakan jumlah yang relatif besar dan merupakan kekuatan bagi organisasi BPBD. Namun dengan melihat status SDM yang melebihi 50% adalah THL juga memberikan sinyal kerawanan dalam operasionalisasi tugas pokok dan fungsi, karena status THL dimungkinkan setiap saat akan berhenti jika mereka mendapatkan tempat kerja yang menurut mereka lebih menjanjikan.

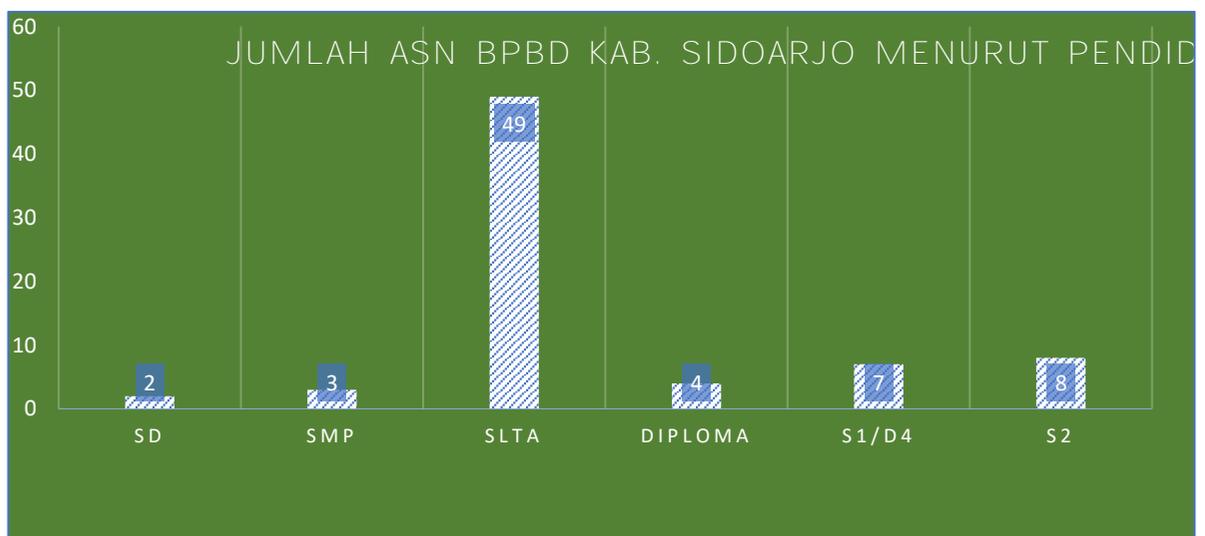
Pembinaan kepada THL harus senantiasa dilakukan dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada mereka dalam rangka membantu mewujudkan terbangunnya karakter pribadi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. THL memiliki peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Meskipun kedudukannya tidak sama dengan kedudukan ASN, namun THL diharapkan tetap dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya.

Selanjutnya dalam tabel beriku disjikan komposisi pegawai atau Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Ruang dan pendidikannya, sebagai berikut :

Tabel 2. Pegawai ASN BPBD Kab. Sidoarjo Menurut Gol. Ruang &amp; Pendidikan

No	JABATAN	GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1	Kepala Pelaksana BPBD	IV/c	S-2
2	Sekretaris	IV/a	S-1
3	Kasubbag. Umum	III/d	S-2
4	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	III/b	SMA
5	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	II/d	SPMA
6	Pramu Bakti	II/b	MTs
7	Petugas Keamanan	II/b	Paket C/IPS
8	Petugas Keamanan	II/c	SMA
9	Petugas Keamanan	I/d	SD
10	Petugas Keamanan	II/b	Paket C/IPS
11	Pranata Komputer Pelaksana	II/d	D.III
12	Kasubbag. Kepegawaian	III/d	S-1
13	Kasubbag. Keuangan	III/c	S-1
14	Bendahara	III/c	S-1
15	Pengelola Keuangan	II/c	STM
16	Pengelola Bahan Perencanaan	II/d	D.III
17	Pengelola Bahan Perencanaan	II/c	STM
18	Pengadministrasi Penerimaan	II/d	STM
19	Kabid. Pemadam Kebakaran	IV/a	S-2
20	Kasi. Sarana dan Prasarana	III/d	S-1
21	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	III/b	S-2
22	Teknisi Peralatan dan Mesin	III/d	STM
23	Pengelola Pengendalian dan Operasional	II/c	D.III
24	Pranata Pemadam Kebakaran	III/c	S-1
25	Pranata Pemadam Kebakaran	III/b	SMA
26	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
27	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
28	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
29	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
30	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
31	Pranata Pemadam Kebakaran	II/b	SMP
32	Pranata Pemadam Kebakaran	II/c	STM
33	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
34	Pranata Pemadam Kebakaran	II/b	SMP
35	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
36	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
37	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMK
38	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
39	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
40	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
41	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA

No	JABATAN	GOL. RUANG	PENDIDIKAN
42	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
43	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
44	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
45	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
46	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
47	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
48	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
49	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
50	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
51	Pranata Pemadam Kebakaran	II/c	Paket C
52	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
53	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
54	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
55	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
56	Pranata Pemadam Kebakaran	II/c	STM
57	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
58	Pranata Penyelamat Bencana	II/d	SMA
59	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	II/c	STM
60	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	I/c	SD
61	Juru Pungut Retribusi	II/d	SMA
62	Juru Pungut Retribusi	II/d	SMA
63	Kabid. Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik	IV/a	S-2
64	Kasi. Pencegahan	III/d	S-2
65	Analisis Bencana	III/a	S-1
66	Pengadministrasi Umum	II/d	SMA
67	Pengelola Data	II/c	STM
68	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV/a	S-2
69	Kasi. Rehabilitasi	III/d	S-2
70	Pengelola Data	II/d	SMA
71	Pengelola Data	II/c	D.III
72	Pengadministrasi Umum	II/d	STM



Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata pendidikan para pegawai ASN di BPBD Kab. Sidoarjo adalah SMA sederajat (68,05%) dan bahkan ada yang berpendidikan SD (dua orang dengan posisi sebagai petugas keamanan dan pengemudi mobil pemadam kebakaran). Situasi demikian dalam konteks pengembangan organisasi publik seperti BPBD, perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja ke depan dengan tuntutan profesionalitas. Tidak berlebihan kiranya untuk semua posisi ASN dalam BPBD ke depan minimal adalah SMK atau SMA Sederajat. Agar para ASN ini dapat lebih mudah meningkatkan kapasitasnya melalui jenjang Pendidikan formal selanjutnya atau pelatihan-pelatihan sesuai kompetensinya, oleh karena bekal minimal pendidikannya mencukupi. Dan ada potensi berkembang untuk meningkatkan kariernya. Di sisi lain komposisi jabatannya Sebagian besar adalah pranata pemadam kebakaran, sedangkan jumlah ASN yang berhubungan langsung dengan kegiatan kebencanaan, jumlahnya masih belum proporsional dengan ASN pranata pemadam kebakaran. Ke depan jumlah ASN yang berkompoten dan portofolio perlu ditambah secara proporsional agar dapat meningkatkan kinerja penanggulangan bencana. Adapun pengembangan kompetensi yang diperlukan adalah di bidang pencegahan dan mitigasi bencana, komunikasi risiko bencana, kedaruratan dan pemulihan pasca bencana, khususnya dalam melakukan A2R2 (Asesmen Awal Rehabilitasi Rekonstruksi) yang mendukung penyusunan Rencana Pemulihan Dini (RPD) dan R3P atau Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana.

Tabel 3. Pegawai THL BPBD Kab. Sidoarjo Menurut Jabatan & Pendidikan

No	JABATAN	PENDIDIKAN	No	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat	50	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
2	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat	51	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
3	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat	52	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
4	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat	53	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
5	Pengemudi	SMA/Sederajat	54	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
6	Pramu Kebersihan	SMA/Sederajat	55	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
7	Pramu Kebersihan	SMA/Sederajat	56	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
8	Pramu Kebersihan	Paket C	57	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
9	Pramu Kebersihan	SMP/Sederajat	58	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
10	Pramu Kebersihan	SMA/Sederajat	59	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
11	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	60	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat

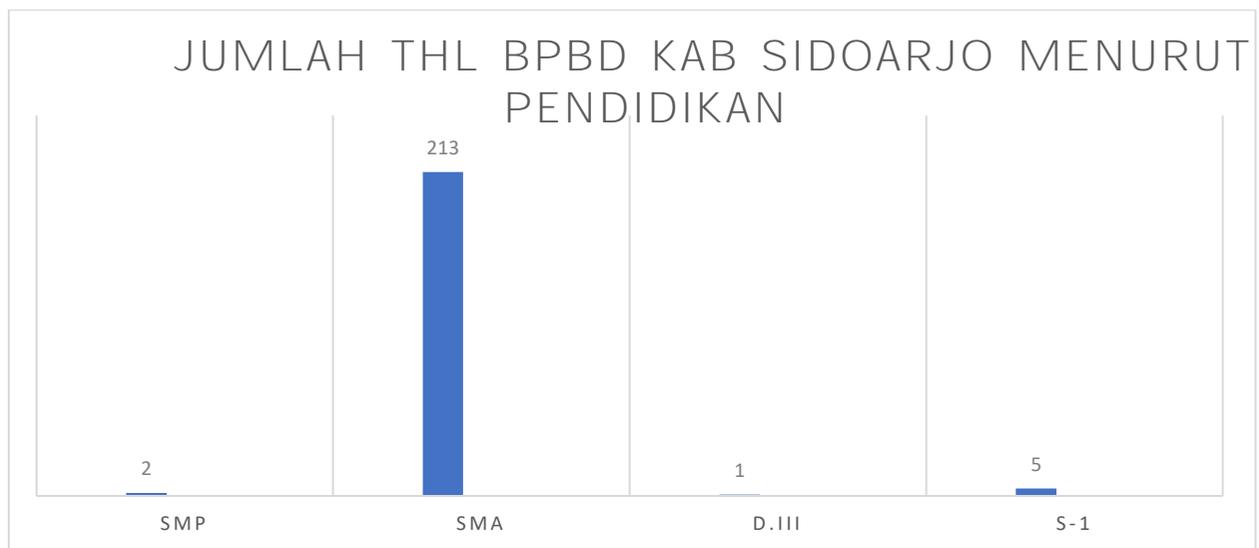
No	JABATAN	PENDIDIKAN	No	JABATAN	PENDIDIKAN
12	Petugas Keamanan	MA/Sederajat	61	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
13	Petugas Keamanan	SMA/Sedera	62	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
14	Petugas Keamanan	SMA/Sedera	63	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
15	Petugas Keamanan	SMK/Sedera	64	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
16	Petugas Keamanan	SMK/Sedera	65	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
17	Petugas Keamanan	SMA/Sedera	66	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
18	Petugas Keamanan	SMK/Sedera	67	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
19	Petugas Keamanan	SMA/Sedera	68	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
20	Petugas Keamanan	MA/Sederaja	69	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
21	Petugas Keamanan	SMA/Sedera	70	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
22	Petugas Keamanan	SMA/Sedera	71	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
23	Petugas Keamanan	Paket C	72	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
24	Petugas Keamanan	Paket B	73	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
25	Petugas Keamanan	SMK/Sedera	74	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
26	Pengelola Kepegawaian	SMA/Sedera	75	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
27	Pengelola Keuangan	MA/Sederaja	76	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
28	Pengelola Keuangan	SMK/Sedera	77	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
29	Teknisi Peralatan dan M	SMA/Sedera	78	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
30	Teknisi Peralatan dan M	SMA/Sedera	79	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
31	Teknisi Peralatan dan M	SMA/Sedera	80	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
32	Teknisi Peralatan dan M	SMA/Sedera	81	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
33	Pengadministrasi Umum	SMK/Sedera	82	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
34	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	83	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
35	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	84	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
36	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	85	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
37	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	86	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
38	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	87	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
39	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	88	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
40	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	89	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
41	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	90	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
42	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederajat	91	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
43	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	92	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
44	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	93	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
45	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	94	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
46	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	95	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
47	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	96	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja
48	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sedera	97	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederaja

No	JABATAN	PENDIDIKAN	No	JABATAN	PENDIDIKAN
49	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	98	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
99	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	154	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
100	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	155	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
101	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	156	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
102	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	157	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
103	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	158	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
104	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	159	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
105	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	160	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
106	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	161	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
107	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	162	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
108	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	163	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
109	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	164	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
110	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	165	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
111	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	166	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
112	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	167	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
113	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	168	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
114	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	169	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
115	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	170	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
116	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	171	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
117	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	172	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
118	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	173	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
119	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	174	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
120	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	175	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
121	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	176	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
122	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	177	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
123	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	178	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederajat
124	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	179	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
125	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	180	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
126	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	181	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
127	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	182	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
128	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	183	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
129	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	184	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
130	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	185	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
131	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	186	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
132	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	187	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
133	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	188	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
134	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	189	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat

No	JABATAN	PENDIDIKAN	No	JABATAN	PENDIDIKAN
135	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sedera	190	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
136	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sederajat	191	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
137	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sedera	192	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
138	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sedera	193	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
139	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sedera	194	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
140	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sedera	195	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
141	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sederajat	196	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
142	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sedera	197	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
143	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sedera	198	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
144	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sedera	199	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
145	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sedera	200	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
146	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sederajat	201	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
147	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sedera	202	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
148	Pranata Pemadam Keb	SMA/Sedera	203	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
149	Pranata Penyelamat B	SMA/Sedera	204	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
150	Pranata Penyelamat B	SMA/Sedera	205	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
151	Pranata Penyelamat B	SMA/Sederajat	206	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
152	Pranata Penyelamat B	SMA/Sedera	207	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
153	Pranata Penyelamat B	SMA/Sedera	208	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat
209	Pengelola Data	SMK/Sedera	216	Pengelola Data	S-1 Teknik Komp
210	Pengelola Data	SMA/Sedera	217	Pengelola Data	S-1 Statistika
211	Pengelola Data	SMA/Sedera	218	Pengelola Data	S-1 Teknik Inforrn
212	Pengelola Data	SMA/Sederajat	219	Pengelola Data	S-1 Informatik
213	Pengelola Data	MA/Sederaja	220	Pengadministrasi Umum	SMK/Sederaja
214	Pengelola Data	D. III Statist	221	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederaja
215	Pengelola Data	S-1 Teknik Kom			

Dari tabel diatas jika kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik seperti dibawah ini, dapat dinyatakan bahwa mayoritas pegawai THI BPBD Kab Sidoarjo adalah SMA sederajat yang berjumlah 213 orang atau 96,38% dari jumlah THL secara keseluruhan. Dari aspek pendidikan dapat dinyatakan bahwa THL yng bekerja di BPBD Kab. Sidoarjo cukup representatif dalam menunjang kinerja BPBD. Namun demikian ke depan harus dipertimbangkan bukan hanya berdasarkan Pendidikan semata tetapi harus memiliki kompetensi dan portofolio yang menunjang dan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kab. Sidoarjo, khususnya dalam program kegiatan penanggulangan

bencana. Kompetensi yang diperlukan dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan mitigasi bencana, kedaruratan atau penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.



## 2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo relatif cukup lengkap dan besar sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Peralatan Operasional Kebencanaan BPBD Kab. Sidoarjo

NO	NAMA	MODEL	JUMLAH
1	Perahu karet	Dengan mesin	1 unit
2	Perahu karet	Tanpa mesin	2 unit
3	Gergaji mesin	Besar/ kecil	4 unit
4	Pompa air	Besar/ kecil	4 unit
5	Genset	Besar	3 unit
6	Tenda	Peleton	6 unit
7	Tenda	Regu	2 unit
8	Tenda	Pengungsi	3 unit
9	Tenda	Family	12 unit
10	Penjernih air	Portable	1 unit
11	Pelampung	Personal	50 unit
12	Radio komunikasi	HT/ RIG	16 unit

13	Sepatu karet	Water proof	20 unit
----	--------------	-------------	---------

Tabel 5. Data Pos PMK sampai dengan tahun 2021

No.	Pos PMK	Keterangan
1.	Unit Buduran	Milik Pemkab Sidoarjo / BPBD
2.	Unit Krian	Milik Pemkab Sidoarjo
3.	Unit Waru	Lahan dan Bangunan milik Pabrik Cat PT. Tunggal Djaja Indah
4.	Unit Porong	Milik Pemkab Sidoarjo
5.	Unit Candi	Lahan dan bangunan milik Pabrik Sepatu PT. Ecco Indonesia

Tabel 6. Data Inventaris Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Kendaraan	Model	Merk	Tahun	Kondisi Barang
1.	Mobil Angkut Peralatan dan Pasukan	Pick Up	Toyota Kijang KF 50	1995	60%
2.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Twin Agent	HINO Super Ranger	1995	40%
3.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Twin Agent	HINO Super Ranger	1995	40%
4.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Twin Agent	IZUSU Elf NKR66	2003	40%
5.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Supply	HINO Dutro	2006	75%
6.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 210 JL	2006	85%
7.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 235 JL	2007	85%
8.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Supply	HINO FG 235 JJ	2010	90%
9.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Daihatsu Terios	2010	100%
10.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Toyota Rush	2012	100%
11.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Toyota Rush	2012	100%
12.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Toyota Rush	2012	100%
13.	Mobil Pemadam Kebakaran (Drop In Unit)	Twin Agent	IZUSU Panther	2012	100%
14.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 235 JJ	2014	100%
15.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 235 JJ	2014	100%
16.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Pick Up	IZUSU TBR 54	2015	30%
17.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	FUSO FM 517 HS	2015	100%
18.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	FUSO FM 517 HS	2015	100%

No.	Jenis Kendaraan	Model	Merk	Tahun	Kondisi Barang
19.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO FG 8JJ10	2015	100%
20.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO FG 8JJ1D BGI	2016	100%
21.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO FG 8JJ1D BGI	2016	100%
22.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO FG 8JJ1D BGI	2016	100%
23.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO Ramgers 235 PS	2017	100%
24.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	ripple		2018	100%
25.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Triple Agent		2018	100%
26.	Mobil Angkutan Pasukan/Peralatan Kebencanaan	Pick up		2018	100%
27.	Mobil Dinas(Hibah dari BNPB)	MPV	Ford Ranger	2012	100%

## 2.3 KINERJA PELAYANAN

BPBD dituntut terus mensosialisasikan keberadaannya, peranannya dan fungsi yang diamanatkan, dalam rangka untuk menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peransatuan kerja lain yang terlebih dahulu ada. Kedepan BPBD akan terus berbenah serta memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. BPBD dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk **tanggap darurat** bencana, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadinya bencana (pascabencana). Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai ketentuan tentang tahapan penanggulangan bencana

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya Capaian kinerja layanan BPBD melalui LAKIP tahun 2021 sebagai tahun terakhir renstra periode sebelumnya (2016-2021) menunjukkan hasil yang positif, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan BPBD

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	%Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Indeks Resiko Bencana (IRB)	105,65%	Sangat Berhasil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian	Kategori
1	Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai SPM	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	76,89%	Cukup
		**Catatan : Terdapat 74 kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap 15 menit dari 175 total kejadian (42,29% dari target 55%)		
		Persentase Penurunan Resiko Bencana	112,27%	Sangat berhasil
		*Catatan : Skor IRB Tahun 2021 adalah 99,21 Target 2021 : 104,72.		

Keterangan :

No.	% Capaian	Kategori
1	>100 %	Sangat Berhasil
2	90-100%	Berhasil
3	75-90%	Cukup
4	<75%	Kurang

## Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

### SASARAN : Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai SPM

#### 1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- a. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dikarenakan re-focusing anggaran sebagai prioritas penanganan pandemi Covid-19;
- b. Kuantitas dan kualitas sumber-daya manusia terbatas ;
- c. Fasilitas / sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran yang terbatas;
- d. Logistik dan peralatan yang masih terbatas dan belum dapat hadir pada waktu dan tempat dibutuhkan;
- e. Terbatasnya jumlah pos pemadam kebakaran tidak sebanding dengan luasnya cakupan wilayah yang rawan bencana dan kebakaran yang harus dilayani dengan akses terbatas;
- f. Beberapa kejadian kebakaran terjadi pada lokasi yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran sehingga mempengaruhi waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran;
- g. Kebutuhan peningkatan kapasitas aparaturnya kebencanaan dan pemadam kebakaran belum terpenuhi dikarenakan tidak adanya anggaran diklat/pelatihan.

#### 2) Upaya yang telah dilakukan :

- a. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik SDM, sarana prasarana ,penggunaan anggaran dan sumber daya informasi;
- b. Menjalinkan kerja sama dengan dunia usaha untuk penambahan pos damkar baru;
- c. Memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana;
- d. Memprioritaskan pelatihan / edukasi kebencanaan untuk masyarakat di kawasan rawan bencana;
- e. Alokasi anggaran untuk kegiatan pendukung SPM;
- f. Pembentukan dan Penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana

#### 3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

- a. Mengupayakan mendapat dukungan anggaran / pendanaan untuk efektifitas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana dan Kebakaran;
- b. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo;
- c. Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
- d. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah;
- e. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana dan kebakaran lintas lembaga;
- f. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran melalui sosialisasi, edukasi dan komunikasi aktif (diklat, pelatihan, dsb.)
- g. Sertifikasi Personil Penanggulangan Bencana untuk Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- h. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan di wilayah / daerah rawan bencana

#### **4) Simpulan atas pencapaian kinerja :**

- a. Perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan BPBD;
- b. Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo masih perlu penguatan pada efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- c. Diperlukan penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- d. Pencapaian sasaran dalam memenuhi waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran masih kurang dari target sehingga perlu ditingkatkan

#### **5) Solusi dan upaya perbaikan di waktu yang akan mendatang**

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja tersebut, maka terdapat catatan dan rekomendasi yang menjadi solusi dan upaya untuk perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang, antara lain :

1. Penguatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan BPBD Kabupaten Sidoarjo;
2. Memperkuat kapasitas kebencanaan dan penanggulangan kebakaran di wilayah dengan cara memberikan edukasi/pelatihan dan sosialisasi;
3. Penguatan kapasitas SDM Kebencanaan dan Kebakaran

Selanjutnya terkait dengan kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo, pada dasarnya memiliki ragam pelayanan sebagai berikut :

TAHAPAN	KEGIATAN
PRA BENCANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Penanggulangan Bencana</li> <li>2. Sosialisasi Sekolah Aman Bencana</li> <li>3. Inisiasi, Koordinasi dan Pelatihan Kelompok Relawan</li> <li>3. Koordinasi Penanggulangan Bencana dengan OPD terkait</li> <li>4. Pemasangan / Pemantauan Alat Peringatan Dini</li> <li>5. Inisiasi Kerjasama dengan Forum CSR Perusahaan di Sidoarjo</li> </ol>
TANGGAP DARURAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Bantuan Darurat (Non Kebakaran)</li> <li>2. Layanan Pemadaman Kebakaran</li> </ol>
PASCA BENCANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Bantuan Rehab / Rekon Non Kebakaran</li> <li>2. Pelaksanaan Bantuan Rehab / Rekon Kebakaran</li> </ol>

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	N/A	N/A	N/A	30%	40%	45%	45%	50%	39,51%	38,55%	32,87%	35,31%	41,54%	131,7%	96,25%	73%	78,46%	83,08%
2	Persentase Penurunan Indeks Resiko Bencana	N/A	N/A	N/A	6%	6%	12%	18%	24%	N/A	15,27%	12%	21,16%	24,59%	N/A	254,5%	100%	117,54%	102,44%

Catatan :

- Rasio capaian = realisasi (:) target x 100%
- Target penurunan IRB berdasarkan target yang telah ditetapkan nasional yaitu penurunan sebesar 30% dalam waktu 5 (lima) tahun. Sehingga dengan menggunakan *baseline* skor IRB Tahun 2013 yaitu 149,6 telah ditetapkan target penurunan sebesar 6% setiap tahunnya.

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Tahun ke-						
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Program Peningkatan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran				6.558.818.30	8.422.677.980				5.417.654.239	7.409.744.311				82,6%	87,97%		
Program pencegahan dini, Kesiapsiagaan, tanggap darurat dan management logistik kebencanaan																	

				1.450.516.47	2.319.740.100				1.263.096.550	1.826.300.671				87,08%	78,73%		
Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				715.704.795	1.005.229.800				492.254.42	797.459.700				69%	79,33%		
Program Pelayanan Kesekretariatan				3.823.373.280	4.072.158.994				2.983.572.393	2.895.713.172				78%	71,11%		

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo

---

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang direncanakan di dalam Renstra sesuai Visi dan Misi di dalam RPJMD dapat berjalan baik, diperlukan langkah strategis, kebijakan dan program yang jelas dan realistis. Langkah-langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu melihat kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Ini berarti dalam hubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo, perlu dilihat dan diketahui kondisi internal dan eksternal BPBD Kabupaten Sidoarjo. Alat dan metodologi untuk melihat lingkungan organisasi yang dikenal luas dan umum, diantaranya adalah; *SWOT Analysis* Namun melihat kondisi organisasi dikaitkan dengan resiko bencana yang dihadapi, maka dipakai pendekatan TOWS. TOWS Analysis merupakan pengembangan dari *SWOT Analysis*, karena menurut Hermawan Kartajaya, *SWOT* lebih berorientasi masa lalu sedang pendekatan TOWS berorientasi ke masa depan dengan melihat terlebih dahulu Ancaman (*Threat*) sebagai faktor berpengaruh. Dengan demikian, potensi organisasi yang dilihat dan dianalisis digeser dari melihat Kekuatan (*Strength*) ke potensi Ancaman (*Threat*), diikuti melihat : Peluang (*Opportunities*), Kelemahan (*Weakness*), dan Kekuatan (*Strength*) yang dimiliki dan dihadapi organisasi. Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir TOWS yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo diasumsikan sebagai berikut.

Ancaman (*Threat*) adalah Situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Sedang Peluang (*Opportunities*) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Di pihak lain Kelemahan (*Weak*) adalah sebagai keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan dan kapabilitas yang secara serius akan menghambat kinerja efektif organisasi, sedang Kekuatan (*Strong*) adalah sumber daya, ketrampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan yang dilayani atau ingin dilayani oleh organisasi. Dalam hal ini langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi terhadap butir-butir TOWS yang dimiliki BPBD Kabupaten Sidoarjo, dan dari uraian di atas, maka butir-butir TOWS yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

## **A. Faktor Eksternal Organisasi**

### **1) Ancaman / Threat**

- a. Bencana Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap aspek fisik dan sosial ekonomi masyarakat di Sidoarjo;
- b. Bencana lumpur Sidoarjo berdampak pada keterbatasan kewenangan BPBD Sidoarjo dalam menanggulangi lumpur Sidoarjo;
- c. Cakupan wilayah yang berpotensi kebakaran cukup luas dan tidak sebanding dengan sarana prasarana yang dimiliki;
- d. Banyaknya industri di Kabupaten Sidoarjo memberikan ancaman terhadap potensi bencana pencemaran lingkungan dan kegagalan teknologi;
- e. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo;
- f. Potensi ancaman bencana tahunan dalam bentuk puting beliung, rob (air pasang), banjir dan kekeringan khususnya penyediaan air bersih.

### **2) Peluang / Opportunity**

- a. Banyaknya industri/dunia usaha di Kabupaten Sidoarjo sehingga terdapat peluang untuk CSR (*Corporate Social Responsibility*);
- b. Adanya dukungan dana APBN dalam Penanggulangan Bencana;
- c. Adanya dukungan dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Adanya dukungan sarana prasarana PMK di dunia usaha / industri di Kabupaten Sidoarjo;
- e. Pesatnya dan dukungan kemajuan Teknologi Informasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- f. Potensi dan permasalahan bencana lumpur memberikan peluang bagi pengembangan BPBD yang lebih baik ke depan

## **B. Faktor Internal Organisasi**

### **1) Kelemahan / Weakness**

- a. Urusan penanggulangan bencana dan kebakaran belum masuk pada urusan wajib sehingga belum menjadi prioritas dalam penganggaran dan pelaksanaan program;

- b. Alokasi anggaran Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo saat ini masih banyak terserap untuk PMK, sedangkan untuk Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan masih belum mencukupi;
- c. Belum terjalinya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga /OPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan;
- d. Proporsi pegawai /SDM masih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas;
- e. Masih terbatasnya jumlah posko Pemadam Kebakaran;
- f. Masih terbatasnya sarana prasarana/peralatan penunjang kebencanaan termasuk kebakaran;
- g. Sosialisasi keberadaan BPBD masih perlu ditingkatkan, terkait dengan tupoksi;
- h. Pelatihan-Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan masih lemah;
- i. Kotak fungsi perencanaan dan pelaporan BPBD tidak termasuk struktur tersendiri dalam BPBD

## **2) Kekuatan**

- a. BPBD Kabupaten Sidoarjo secara legalitas sudah terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Tersedianya alokasi anggaran Penanggulangan Bencana dari APBD;
- c. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai dasar Kelembagaan dan kegiatan operasional BPBD;
- d. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat (1);
- e. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- g. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
- h. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota

- i. Dimasukkannya pemadam kebakaran menjadi salah satu organisasi dan bidang dibawah koordinasi BPBD, sehingga mempercepat koordinasi apabila terjadi bencana kebakaran;
- j. Dukungan anggaran APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Progam Rehabilitasi dan Rekonstruksi (bantuan sosial berpola hibah);
- k. Adanya kerjasama dengan kelompok relawan lokal
- l. Adanya kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha

Hasil dari identifikasi terhadap butir-butir TOWS di atas, menunjukkan bahwa Ancaman dan Peluang yang dihadapi serta Kelemahan dan Kekuatan yang dimiliki BPBD Kabupaten Sidoarjo, dapat dirangkum kedalam 3 (tiga) bidang kegiatan sesuai kompetensi sebagai berikut.

1. **Bidang Tugas dan Fungsi;** yang dilaksanakan sesuai undang-undang dan peraturan/ketentuan tentang BPBD
2. **Bidang Sarana Prasarana :** yang termasuk di dalam kelompok ini antara lain ; Sumberdaya Manusia sebagai asset, Infrastruktur yang dimiliki (*Hardware dan software*) Peralatan pendukung tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya lain yang diperlukan.
3. **Bidang Administrasi dan Pengawasan :** adalah seluruh aktivitas penunjang organisasi BPBD di bidang administrasi, keuangan, pelaporan dan pengukuran kinerja serta pengawasan.

Dari pengelompokan kompetensi kegiatan tersebut secara menyeluruh dilakukan identifikasi ulang butir TOWS sebagai berikut.

#### 1) **Ancaman (*Threat*)**

##### a. **Bidang Tugas dan Fungsi BPBD**

1. Topografi dan geografi Kabupaten Sidoarjo sebagian besar luasnya adalah wilayah daratan dengan potensi resiko bencana pandemi covid-19, banjir dan kekeringan.
2. Jumlah penduduk, tingkat kepadatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo relatif padat dan heterogen
3. Tingkat pendidikan dan ketergantungan mata pencaharian masyarakat di bidang industri, pertanian dan birokrat
4. Kesenjangan tingkat kesejahteraan perlu perhatian dan peningkatan

**b. Bidang Sarana Prasarana**

1. Kebijakan untuk penambahan pos-pos PMK dan kelengkapan peralatannya belum optimal
2. Sumber dana untuk membiayai program, kegiatan dan sarana pendukung operasional penanggulangan bencana terbatas
3. Hardware dan software teknologi informasi kebencanaan belum terpenuhi sesuai kebutuhan dan belum dimiliki secara lengkap.

**c. Bidang Administrasi dan Pengawasan**

1. Sistem administrasi keuangan, pelaporan, dan penilaian kinerja organisasi belum baku
2. Fungsi pengawasan dan pemeriksaan belum terakomodasi baik

**2) Peluang (Opportunities)**

**a. Bidang Tugas dan Fungsi**

1. Makro & mikro ekonomi regional dan nasional mendukung
2. Berpengalaman dalam pengelolaan dan layanan bencana bidang pemadam kebakaran
3. Stabilitas keamanan, sosial dan politik regional baik/stabil

**b. Bidang Sarana Prasarana**

1. Pengembangan Layanan PMK ke kawasan industri
2. Dukungan pemerintah kabupaten cukup baik
3. Dikenal luas masyarakat dan dunia usaha dan mampu bekerjasama
4. Besarnya jumlah penduduk merupakan potensi pendukung tugas
5. Infrastruktur cukup lengkap di wilayah Kabupaten Sidoarjo

**c. Bidang Administrasi dan Pengawasan**

1. Adanya dukungan dari OPD lain untuk bekerja sama
2. Badan Pemeriksa dan Pengawas OPD berfungsi di Kabupaten
3. SDM berpengalaman di bidang administrasi dan layanan publik

**3) Kelemahan (Weakness)**

**a. Bidang Tugas dan Fungsi**

1. Belum masuknya urusan wajib untuk urusan penanggulangan bencana dan kebakaran;

2. Kinerja kegiatan belum optimal dan teruji di bidang kebencanaan
3. Kompetensi SDM kurang kuat dan perlu peningkatan kualitas
4. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan masih perlu peningkatan
5. Sumber Pendanaan terbatas

**b. Bidang Sarana Prasarana**

1. Inventarisasi dan Pengelolaan aset perlu dibenahi
2. Gedung kantor dan gudang kurang mendukung kegiatan organisasi
3. Pemeliharaan dan cek kesiapsiagaan peralatan perlu ditingkatkan
4. Belum sempurnanya aplikasi Sidoarjo Tanggap (SIGAP)

**c. Bidang Administrasi dan Pengawasan**

1. Chek dan recheck pengelolaan keuangan dan logistik perlu ditingkatkan
2. Pola penyampaian informasi kepada masyarakat belum baik

**4) Kekuatan (Strenght)**

**a. Bidang Tugas dan Fungsi**

1. Merupakan organisasi yang harus ada sesuai undang-undang
2. Struktur, unsur organisasi dan program kegiatan mampu berkembang
3. Merupakan OPD Pendukung/Penunjang Pemerintahan Daerah

**b. Bidang Sarana Prasarana**

1. Kantor dan kelengkapan sarana prasarana mendukung
2. Yuridis formal organisasi kuat dan lengkap
3. Dikenal di seluruh pelosok Desa/Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
4. Infrastruktur memadai dan mudah dijangkau di setiap wilayah kabupaten

**c. Bidang Administrasi dan Pengawasan**

1. Adanya Badan Pemeriksa dan Inspektorat Kabupaten
2. Adanya pembinaan dari kementerian dan Badan terkait

Berdasar uraian di atas diasumsikan hasil identifikasi butir TOWS sesuai dengan kondisi yang dihadapi BPBD Kabupaten Sidoarjo, untuk itu dilakukan pemberian Nilai (**Scoring**) dan Bobot (**Weighting**) terhadap butir TOWS dengan pendekatan menggunakan model *Analytical HierrarchyProcess* (AHP), di mana di setiap butir TOWS diberi Nilai **1 (Satu)**, dan di **Bobot** (dalam %) yang penetetapannya didasarkan kepada seberapa besar/kuat peranan dan atau pengaruh dari masing- masing bidang terhadap lingkungan organisasi, sebagai berikut.

1. Bidang Tugas dan Fungsi diberi bobot 35 %

2. Bidang Sarana Prasarana diberi bobot 40 %
3. Bidang Administrasi dan Pengawasan diberi bobot 25 %

Kemudian dilakukan perhitungan per bidang dengan cara sebagai berikut : **Nilai X Bobot** dari masing-masing butir TOWS, sedang untuk melihat posisi dan keberadaan organisasi merupakan hasil dari : **(Peluang - Ancaman)** dan **(Kekuatan -Kelemahan)**, dengan rangkuman hasil sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Perhitungan dan Pengukuran Analisis TOWS

Butir-Butir	Nilai	Bobot	Hasil
<b>Ancaman ( T )</b>			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	5,00	0,35	1,75
b. Bidang Sarana Prasarana			
c. Bidang Adm. & Pengawasan	4,00	0,40	1,60
	2,00	0,25	0,50
<b>Nilai Kelompok Ancaman</b>			<b>3,85</b>
<b>Peluang ( O )</b>			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	3,00	0,35	1,05
b. Bidang Sarana Prasarana			
c. Bidang Adm. & Pengawasan	5,00	0,40	2,00
	3,00	0,25	0,75
<b>Nilai Kelompok Peluang</b>			<b>3,80</b>
<b>Nilai Eksternal</b>			
			<b>(0,05)</b>
<b>Kelemahan ( W )</b>			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	4,00	0,35	1,40
b. Bidang Sarana Prasarana			
c. Bidang Adm. & Pengawasan	3,00	0,40	1,20
	2,00	0,25	0,50
<b>Nilai Kelompok Kelemahan</b>			<b>3,10</b>
<b>Kekuatan ( S )</b>			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	3,00	0,35	1,05
b. Bidang Sarana Prasarana	4,00	0,40	1,60

c. Bidang Adm. & Pengawasan	2,00	0,25	0,50
Nilai Kelompok Kekuatan			3,15
Nilai Internal			0,05

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa keberadaan dan posisi BPBD Kabupaten Sidoarjo, dihadapkan pada lingkungan Eksternal dan Internal organisasi berada di Kuadran ( -0,05 ; +0,05 ) yang dapat digambarkan ke dalam diagram TOWS *Analysis* Di mana dari gambar diagram diketahui keberadaan dan posisi BPBD Kabupaten Sidoarjo, merupakan kuadran **Negatif** dan **Positif**, yakni **kuadran Stabilitas (Stability)**. Artinya untuk saat ini BPBD Kabupaten Sidoarjo, sebagai organisasi yang relatif baru, posisinya berada dalam kondisi **Stabil** karena **Kekuatannya** masih relatif lebih besar dari **Kelemahan** yang dimiliki, sedang **Ancaman** yang dihadapi tampaknya juga lebih besar dibanding **Peluang**-nya.

Kondisi dan posisi organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan ke dalam diagram TOWS sebagai berikut.

Gambar 3. Diagram Hasil Analisis TOWS (SWOT)



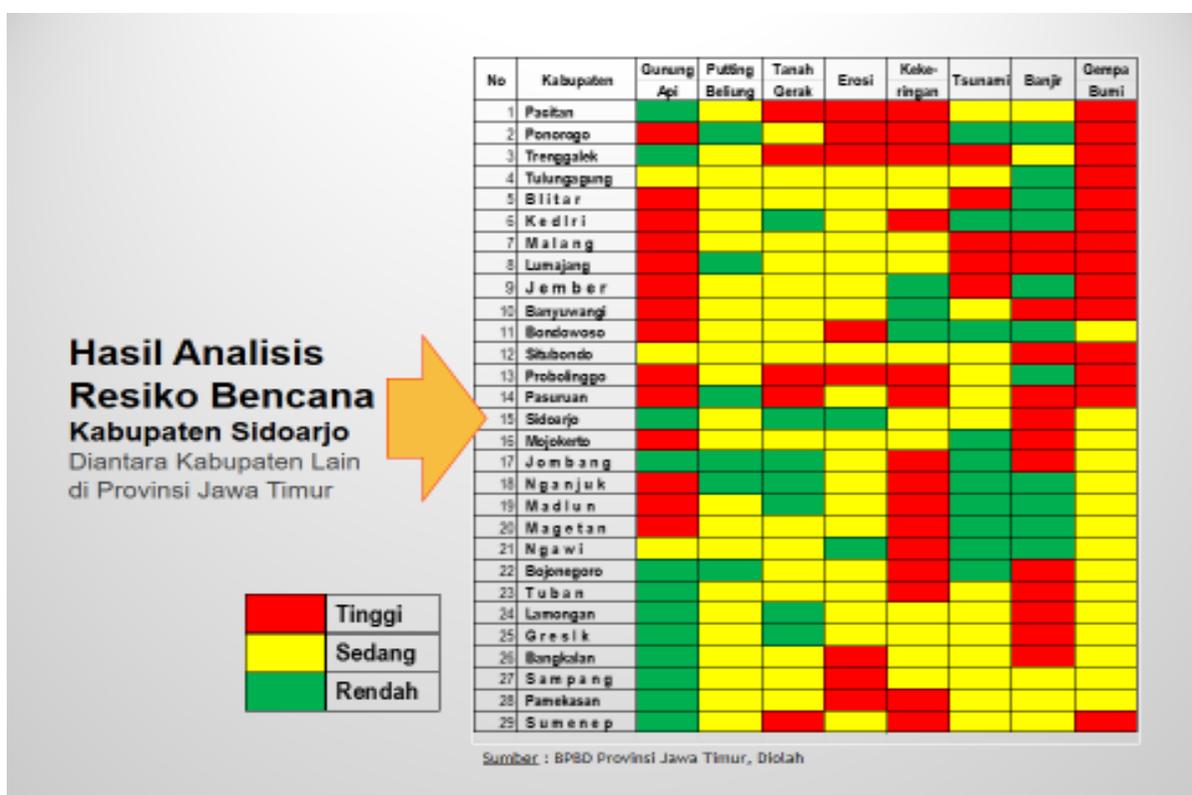
Gambar diagram TOWS tersebut di atas juga menunjukkan bahwa ;Kebijakan, Strategi serta Program dan Kegiatan yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan **kuadran Stability**.Kebijakan, Strategi serta Program dan Kegiatan yang searah dengan kondisi dan posisi organisasi saat ini yakni : Kebijakan yang bersifat penataan, perbaikan, rekonstruksi, dan koordinasi secara selektif (*Selective Maintenance*) dan perbaikan, rekonstruksi, dan koordinasi secara cepat (*Agresive Maintenance*) ke arah **Sinergitas** dalam pelaksanaan kegiatan dan implementasi program-program yang direncanakan. Baik dalam upaya untuk pengembangan organisasi maupun diversifikasi ke arah pelayanan publik yang semakin baik/prima, agar di masa mendatang dapat dicapai posisi organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo pada Kuadrani Bertumbuh (*Growth*)

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD KABUPATEN SIDOARJO

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi rawan bencana dan resiko bencana dari setiap jenis bencana yang ada, diketahui berdasarkan tingkat kerawanan bencananya sebagai berikut.

Tabel 11. Kondisi Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo



Data di atas menunjukkan bahwa resiko bencana, khususnya untuk 8 (delapan) jenis bencana alam, tingkat Resiko Tinggi (Merah) di Kabupaten Sidoarjo ada pada ancaman bencana Banjir, sedang untuk ancaman bencana lainnya yang berada pada tingkat Sedang (Kuning) adalah ; Puting beliung, Kekeringan, Tsunami dan Gempa Bumi, dan untuk ancaman bencana pada tingkat resiko Rendah (Hijau) ada di bencana ; Gunung Api, Tanah gerak dan Erosi. Di pihak lain, dengan kepadatan penduduk dan banyaknya kawasan industri di Kabupaten Sidoarjo, diduga masalah kebakaran dan kegagalan teknologi juga berpotensi menimbulkan resiko.

Selanjutnya merujuk pada dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020 – 2024, bahwa sejumlah isu strategis kebencanaan, antara lain adalah meningkatnya Risiko Bencana Geologi yang ditandai dengan **makin meningkatnya kejadian gempabumi sejak 2013**. Indonesia adalah wilayah yang terletak di pada jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar- sesar aktif di daratan. Segmen-segmen sesar aktif yang berpotensi menghasilkan gempa di atas skala magnitudo 6,5 diidentifikasi mencapai 295 sesar. Hal ini menunjukkan banyaknya potensi lokasi yang dilintasi oleh sesar aktif dan terancam bahaya guncangan gempa serta deformasi oleh pergerakan sesar.

Frekuensi gempa bumi dengan magnitudo kurang dari magnitudo 5 juga relatif tinggi. Meskipun dengan magnitudo yang kecil, namun bila terjadi pada jalur sesar aktif di kedalaman yang dangkal maka gempa tersebut dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur dan meresahkan masyarakat. Berdasarkan catatan BMKG, rata-rata dampak kejadian gempabumi dalam satu tahun dapat disimpulkan sebagai berikut: (i) gempa dalam berbagai magnitudo sebanyak sekitar 5.000-6.000 kali; (ii) Gempa signifikan berkekuatan  $M > 5,0$  sebanyak 250-350 kali; (iii) Gempa merusak terjadi sebanyak sekitar 8-10 kali; (iv) dalam 2 tahun gempa berpotensi tsunami terjadi 1 kali.

Disii lain potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim mengalami peningkatan yang dibarengi dengan peningkatan jumlah DAS kritis akibat tingginya degradasi dan sedimentasi DAS. Adapun berdasarkan catatan Direktorat PEPDAS – PDASHL, pada 2018 dari total 17.076 DAS, terdapat setidaknya 2.145 DAS kritis yang dipulihkan, setengahnya terdapat di kawasan pulau Sulawesi dan Maluku. Terdapat 15 DAS prioritas nasional untuk direhabilitasi. DAS Prioritas tersebut adalah DAS Asahan Toba, Siak, Musi, Sekampung, Ciliwung, Cisadane, Citarum, Serayu, Solo, Brantas, Kapuas, Moyo, Limboto, Saddang, dan Jeneberang. Sedangkan dari 6 (enam) gugusan pulau-pulau besar di Indonesia, hanya Kalimantan dan Papua yang mengalami surplus dalam tata kelola air, sementara Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara cenderung mengalami defisit dan krisis dalam tata kelola air. Laju sedimentasi di negara-negara tropis basah seperti Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan curah hujan rendah. Laju erosi yang tinggi akibat curah hujan juga berakibat pada bentang alam Indonesia yang rentan terhadap degradasi lahan. Kerugian ekonomi akibat erosi di Pulau Jawa saja mencapai USD 400 juta setiap tahunnya. Kondisi ini juga mendatangkan potensi masalah ketersediaan air minum di masa depan karena tingginya laju sedimentasi serta tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. **Aspek tata kelola, perencanaan, dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah** saat ini juga mengemukan

sebagai isu-isu strategis kebencanaan. Upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pascabencana. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi program 2017 terdapat 31 K/L yang terlibat pada penanggulangan bencana dengan total anggaran Rp54,670 triliun. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk prabencana sebesar Rp32,370 triliun, penanganan darurat bencana sebesar Rp11,975 triliun, dan pascabencana hanya sebesar Rp9,33 triliun. Selain di level nasional, kurangnya alokasi anggaran pemulihan ini terjadi pula pada level pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dari sisi pembiayaan, dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan. Saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan perundangan, kerangka kelembagaan dan berbagai skema inovasi pembiayaan yang menasar pada kemampuan tata kelola risiko bencana (penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi).

Selain dari kontribusi APBN/APBD, pendanaan dapat berasal dari himpunan dana swasta, badan internasional, BUMN dan masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang ditetapkan melalui regulasi. Pembentukan pooling fund dan produk turunannya akan dirumuskan sebagai instrumen transfer risiko tepat sasaran yang memperkuat pembiayaan dari APBN yang sudah berjalan. b) Perencanaan Penanggulangan Bencana belum optimal digunakan sebagai acuan dalam menurunkan risiko bencana. Di tingkat daerah, RPB terkadang belum terintegrasi dengan RPJMD dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan survei (BNPB, 2018), dari seluruh daerah yang telah menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJM Daerah. Oleh karena itu, kajian perencanaan dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian. Banyak kawasan risiko bencana yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan, seperti: daerah aliran sungai, kawasan gunung api, area kebakaran hutan dan pesisir rawan tsunami. Penguatan kerja sama dan tata kelola bencana di daerah merupakan mandat UU No. 23/2014, yang berimplikasi kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Terlebih, melalui terbitnya PP No. 2/2018 dan Permendagri 101/2018 yang mengamatkan pembenahan mekanisme kerja sama antar kelembagaan di daerah dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana. Kerja Sama antar daerah wajib bagi daerah yang mempunyai potensi kejadian bencana lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi. Inisiasi dan penguatan kerja sama daerah dalam penanggulangan bencana dapat menggunakan mekanisme yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Terkait dengan pandemic Covid-19, maka isu-isu terkait dengan **adaptasi kebiasaan baru yang aman dan produktif sebagai fase transisi darurat ke pemulihan darurat bencana non-alam covid-19** menjadi salah focus penanggulangan bencana ke depan. Sektor-sektor PDB terdampak Covid-19 membutuhkan perlindungan dan insentif untuk memacu perbaikan pertumbuhan ekonomi negara pasca krisis. Perlindungan terhadap sektor-sektor ekonomi terdampak perlu dilakukan melalui pemberian stimulus ekonomi, baik untuk sektor ekonomi formal maupun informal. Pemerintah dapat melakukan rasionalisasi skema dan kebijakan keuangan, termasuk subsidi pajak, listrik dan komunikasi bagi sektor komersil, serta pemberian stimulus ekonomi dan bantuan sosial bagi sektor ekonomi informal dan masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut dimaksudkan agar perekonomian dapat tetap tumbuh di masa pandemi.

Untuk menjaga perputaran sektor logistik, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan perlindungan dan optimalisasi terhadap sektor-sektor dalam negeri yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pertanian, perusahaan pakan ternak, pemotongan dan pengolahan daging untuk melanjutkan operasi, sehingga dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dalam negeri. Perlindungan dan insentif perekonomian tersebut perlu diintegrasikan dengan upaya-upaya penurunan kerentanan sosial ekonomi dan berfokus pada masyarakat di daerah rawan bencana, terutama kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak.

Adanya hambatan (seperti kesenjangan digital, kesatuan informasi, dsb,) pada proses komunikasi risiko hingga menyulitkan masyarakat untuk bersikap menghadapi Covid-19. Komunikasi risiko perlu dilakukan agar masyarakat memahami dan memutuskan tindakan yang harus dilakukan. Pola komunikasi risiko yang dikembangkan perlu memperhatikan kesatuan informasi, perubahan gaya hidup, dan kesenjangan digital yang ada di masyarakat. Kualitas komunikasi risiko tidak hanya dinilai dari keteraturan penyampaian informasi, namun juga dari sejauh mana informasi yang diterima mampu menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat. Efektivitas komunikasi risiko ditentukan oleh siapa yang menyampaikan pesan, bentuk pesan yang disampaikan, saluran yang digunakan, serta target penerima pesan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki jarak perbedaan budaya dan karakteristik masyarakat yang lebar, maka jarak perbedaan ini perlu dipertimbangkan dalam membangun komunikasi risiko. Dalam suatu masyarakat memiliki jarak perbedaan yang lebar, pesan yang sama dan dengan saluran komunikasi yang samadapat

dimaknai berbeda, oleh karena itu pemilihan informasi, pola, dan saluran penyebaran informasi akan menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas komunikasi risiko.

Adapun isu strategis lainnya yang menjadi perhatian saat ini adalah **reformasi elemen sistem penanggulangan bencana**. Antara lain terkait dengan revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memasuki tahap pembahasan di legislatif. Terdapat beberapa kemungkinan perubahan yang berpotensi merubah format penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, RENAS PB perlu memberikan ruang penyesuaian jika nanti Undang-undang yang baru telah diberlakukan.

Untuk itu maka perlu dilaksanakannya Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi bencana non alam skala besar. Pandemi Covid-19 direspon oleh pemerintah dengan melakukan Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana. Reformasi sistem diarahkan kepada peningkatan kemampuan negara khususnya dalam menghadapi bencana non-alam skala besar. Untuk mendukung upaya reformasi tersebut, maka juga dilakukan reformasi terhadap sistem-sistem pendukung lain yang mempengaruhi optimalitas sistem ketahanan bencana nasional, yaitu antara lain: (i) Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana; (ii) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; dan (iii) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

Dengan demikian pemerintah dituntut untuk menyiapkan perangkat dan fasilitas pendukung penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana bagi seluruh kabupaten/kota. SPM Sub Urusan Bencana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka penanggulangan bencana menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah. Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM disebutkan bahwa Tahapan Penerapan SPM adalah pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Tahap yang krusial adalah pengumpulan data tematik kebencanaan. Data ini perlu disiapkan daerah secara detail untuk memetakan target layanan, seperti data individu warga negara, data individu aparat dan petugas, data sarana prasarana dan data kejadian

bencana untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia. Pengumpulan data ini perlu didukung oleh seluruh pihak khususnya kementerian/lembaga terkait.

Sejumlah isu strategis lainnya yang masih relevan untuk mendapat atensi adalah 2 (dua) isu pokok tentang Pengurangan Risiko Bencana, yaitu : (1) belum memadainya kinerja penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana, dan (2) masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dipihak lain, integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan Pembangunan masih terkendala oleh beberapa hal, antara lain kesenjangan persepsi masyarakat maupun aparat pemerintah tentang pengurangan risiko, yang selama ini pemahamannya masih sebatas pada tanggap darurat, kurangnya sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada stakeholder dan keterbatasan kapasitas baik kelembagaan, SDM dan pendanaan dalam pengurangan risiko bencana.

Disamping itu beberapa isu strategis kebencanaan yang juga perlu dicermati sebagai bagian dalam implementasi program-program penanggulangan bencana adalah : (i) **kolaborasi pentahelix** dengan menambahkan unsur akademisi & media (belakangan muncul gagasan konsep Hexa Helix dengan menambahkan unsur affected communities); (ii) **Isu-isu tatakelola kebencanaan yang terkadang terhambat sinergitas antara perangkat daerah** dengan fleksibilitas peran yang rendah dan perlunya membangun model tatakelola kolaboratif (collaborative governance); (iii) **Isu-isu kapasitas lokal** masih perlu mendapat atensi yang lebih secara substantif dengan menggandeng berbagi pihak, termasuk melibatkan perguruan tinggi di tingkat daerah / lokal; (iv) **Isu lingkungan** yang boleh jadi secara mayoritas adalah man-made disaster, seperti penebangan pohon yang masif, pencemaran sungai, hingga Indonesia menjadi negara pencemar sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia; (v) dalam hal **pendanaan khususnya dari sisi pemulihan pasca bencana**, perlunya keseimbangan (secara proporsional) antara pemulihan fisik dan pemulihan sosial ekonomi sehingga tidak hanya terfokus pada pemulihan fisik semata; (vi) dukungan **edukasi kebencanaan harus terus didorong** bukan saja sebatas materi suplemen namun perlu masuk dalam kurikulum. Dalam implementasinya tidak banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ke dalam kurikulum.

Dengan merujuk pada sejumlah isu-isu strategis diatas, maka point of view terhadap kebijakan penanggulangan bencana dapat dilihat dari perpektif yang berbeda, antara lain : (i) bahwa pemahaman visi dan makna tentang kemandirian **masyarakat korban bencana bukanlah orang yang sama sekali "tidak berdaya"**, akan tapi hanya perlu leverage atau daya ungkit yang tepat sehingga mereka dapat berdaya dalam melakukan dan atau me-manage risiko bencana yang ada di wilayahnya; (ii) dengan adanya dukungan IT seperti aplikasi Ina-Risk dan konsep tentang filosofi Wei-Ji (ada bahaya / dangerous tapi juga sekaligus ada peluang / opportunity) maka bencana adalah bagian dari pembangunan yang diposisikan sebagai tantangan dan atau drive force pembangunan, bukan faktor eksternal yang menghambat dan selalu berkonotasi dengan force major; (iii) melakukan revitalisasi "budaya lokal" yang dinamis khususnya pada masyarakat di Jawa Timur yang memiliki kekayaan budaya lokal yang beragam namun perlu dipadukan dengan Internet of Things (IoT); (iv) memberi peran yang proper atau memadai bagi kiprah perempuan dalam program-program PRB khususnya pada level komunitas (misal :Srikandi Tangguh). Perempuan dan jejaringnya dapat dimanfaatkan sebagai agen-agen PRB di komunitasnya dalam rangka memberikan literasi dan pembelajaran tentang penanggulangan bencana; dan (v) melihat potensi bencana yang ada sudah sepatutnya program asuransi bencana menjadi pilihan strategis dan teranggarkan. Oleh karena sampai dengan saat ini, penanganan akibat dari bencana sebagian besar masih menjadi tanggung jawab pemerintah. sudah seharusnya melakukan risk-sharing dengan pihak swasta, sehingga dapat mengurangi beban pemerintah.

Adapun yang terkait dengan bencana kebakaran, maka isu-isu strategis yang mengedepan adalah yang berhubungan dengan metode optimasi lokasi pemadaman agar mendapatkan lokasi lokasi pos pemadam kebakaran yang tepat sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan penanganan kejadian kebakaran. Diharapkan metode ini dapat meminimalkan dampak atau kerugian yang ditimbulkan baik korban jiwa, harta benda, kerusakan infrastruktur publik, dan bangunan fisik lainnya. Untuk mengkaji model tersebut, Kabupaten Sidoarjo, sebagai kabupaten yang sedang berkembang dalam bidang pembangunan namun memiliki berbagai masalah terkait dengan bencana seperti kebakaran. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran dan memberikan arahan rekomendasi lokasi pos pemadam kebakaran yang baru bagi wilayah yang belum terjangkau oleh pos pemadam kebakaran yang sudah

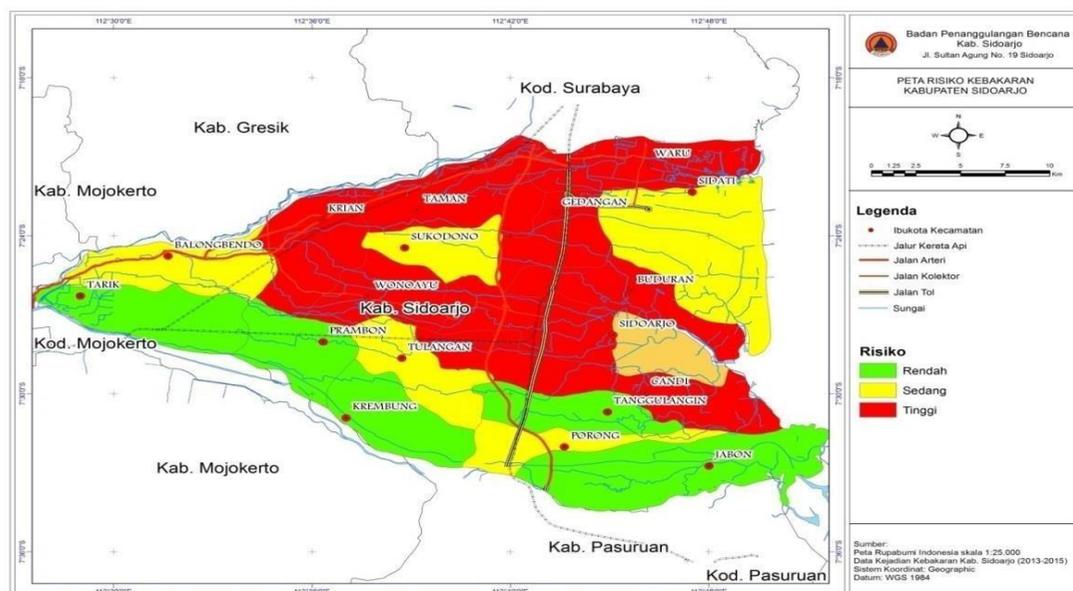
ada. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi risiko kebakaran
2. Mengidentifikasi jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran eksisting
3. Mengidentifikasi tingkat aksesibilitas jaringan jalan.
4. Mengidentifikasi sumber air.
5. Memberikan arahan rekomendasi lokasi pos pemadam kebakaran yang baru

## 1) Identifikasi Risiko Bencana Kebakaran

Berdasarkan analisis risiko kebakaran yang dilakukan sebelumnya diketahui bahwa risiko kebakaran di kabupaten sidoarjo adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Sidoarjo (Kajian Tahun 2015)



Dari peta risiko kebakaran dapat di jelaskan bahwa kawasan/ wilayah yang berisiko tinggi terhadap bahaya kebakaran adalah di kawasan yang padat pemukiman, kawasan industri dan pertokoan.

Berdasar hasil survey data baik data primer maupun sekunder, menyatakan bahwa luas Kabupaten Sidoarjo adalah 71.427,00 Ha hektar, dengan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

1. 0-3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berairasin/payau berada di belahan timur seluas 27.011,25 Ha atau 37,82%
2. 3-10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar seluas 25,889 Ha atau 36,24%

3. 10-25 meter terletak di daerah bagian barat seluas 18.524 Ha atau 25,95%

Jumlah penduduk berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2020 sebesar 2.033.764 jiwa mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.266.533 jiwa. Penurunan ini patut diduga bahwa dari data Sensus Penduduk 2020 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo, 21 Januari 2021, dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo terdapat sebesar 12.6% atau 262.4 ribu jiwa, masih ber-KTP luar kota dan karena pandemic yang berlangsung hampir dua tahun ada kemungkinan penduduk yang ber-KTP non Sidoarjo menuju domisilinya. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Taman yaitu 207.815 jiwa, sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit yaitu 56.266 jiwa.

Tabel 12. Jumlah Penduduk dan luasan per Kecamatan

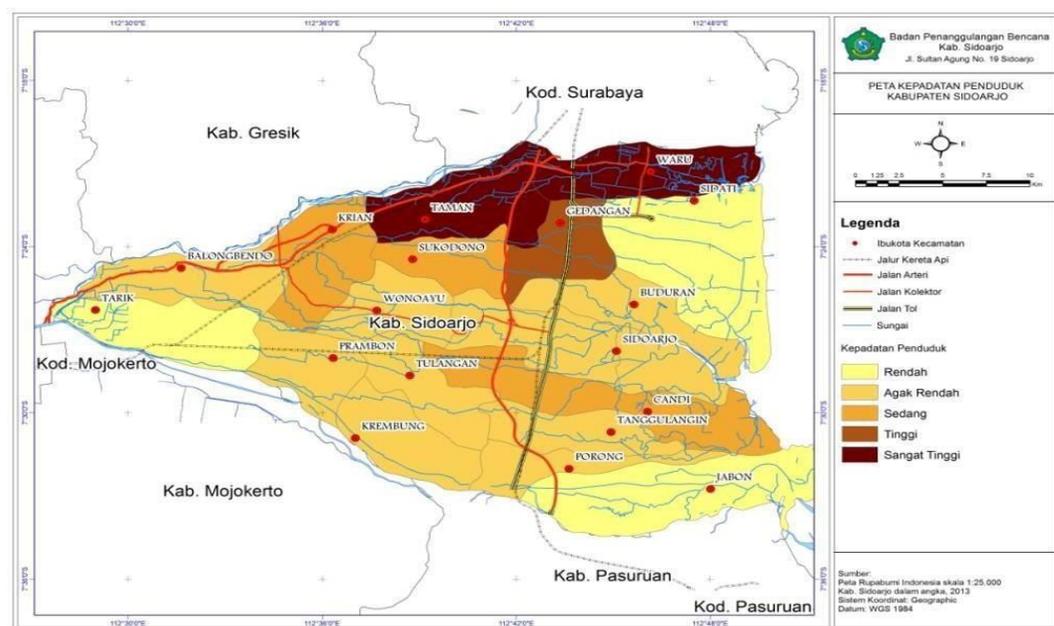
Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	Jumlah		
	2018	2019	2020
Tarik	71 308	72 206	69 189
Prambon	84 095	85 157	79 952
Krembung	74 706	75 731	69 887
Porong	85 790	85 700	73 446
Jabon	60 659	61 092	56 266
Tanggulangin	106 003	106 685	89 804
Candi	165 552	168 779	153 423
Tulangan	105 450	107 683	102 339
Wonoayu	89 209	90 794	85 586
Sukodono	130 056	132 644	121 859
Sidoarjo	225 761	228 713	201 115
Buduran	106 240	108 457	98 710
Sedati	109 831	111 788	96 636
Waru	239 348	240 674	200 754
Gedangan	133 522	134 787	120 003
Taman	233 347	235 238	207 815

Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	Jumlah		
	2018	2019	2020
Krian	137 818	140 183	130 930
Balongsendo	79 374	80 222	76 050
Total Kabupaten Sidoarjo	2 238 069	2 266 533	2 033 764

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hasil Registrasi Penduduk (De Jure)

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2020 (BPS Kabupaten Sidoarjo)

Gambar 5. Peta Tingkat Kepadatan Penduduk



### 1) Identifikasi Jangkauan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran Eksisting

Dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran perkotaan setiap kota wajib memiliki pos pemadam kebakaran agar terlindungi dari resiko bencana kebakaran perkotaan. Lokasi Pos pemadam kebakaran dapat mempengaruhi skala pelayanan terhadap cepat tanggap petugas pemadam

kebakaran untuk menuju lokasi terjadinya bencana kebakaran. Semakin jauh lokasi pos pemadam kebakaran maka semakin besar pula jarak yang harus ditempuh petugas pemadam kebakaran. Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Apabila pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah manajemen kebakarannya pun harus disesuaikan dengan perubahan tersebut (KEPMEN PU no.11/kpts/2000).

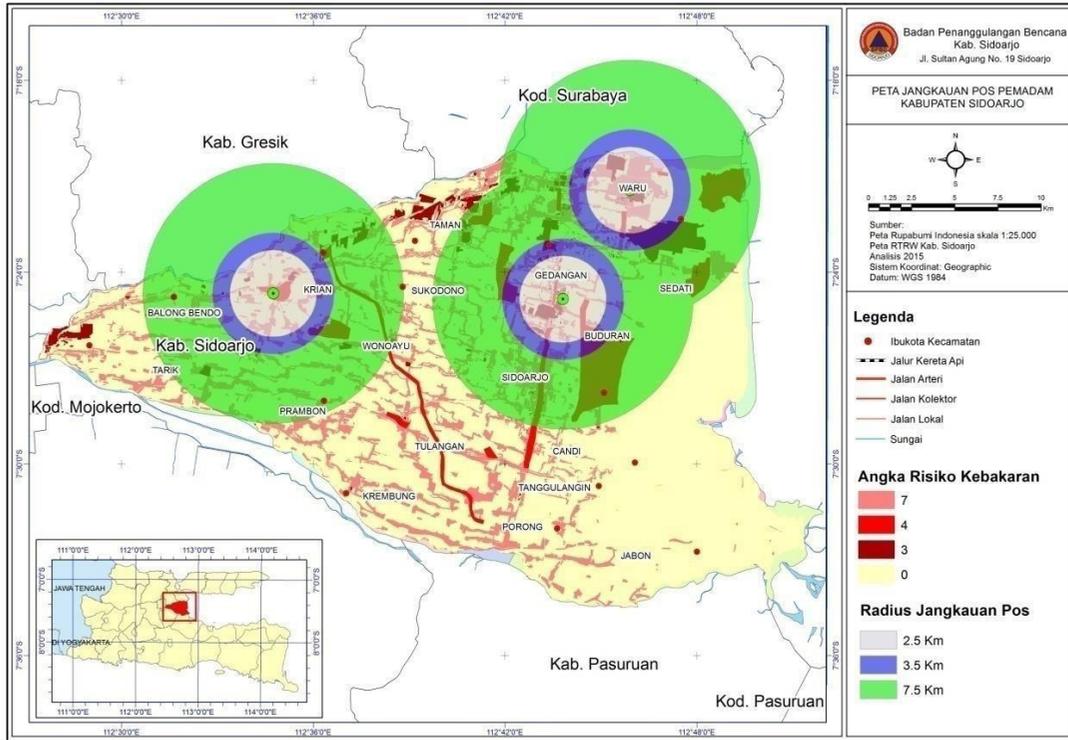
Jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran merupakan faktor penting karena terkait oleh waktu tempuh dalam penanganan bencana kebakaran. Berdasarkan KEPMEN PU no.11/kpts/2000: Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (Response time) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut. Pos pemadam kebakaran sesuai wilayah layanan penanggulangan bencana kebakaran harus memenuhi waktu tempuh pelayanan cepat tanggap penanggulangan bencana kebakaran maksimal sebesar 15 menit. Cepat tanggap 15 menit yang dimaksud merupakan waktu maksimal petugas pemadam kebakaran dari tahap awal sampai dengan gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran. Cepat tanggap 15 menit petugas pemadam kebakaran terbagi atas 3 tahap, 5 menit pertama merupakan tahap persiapan, 5 menit kedua merupakan tahap perjalanan (dari pos menuju lokasi kejadian kebakaran), tahap ketiga merupakan tahap gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran.

Standar perletakan pos pemadam kebakaran dalam skala kota:

1. Berdasarkan Kepmen PU No.11/KPTS/2000 Ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan, yaitu:
  - a. Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 7,5 km dari sektor.
  - b. 1 (satu) pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan.
2. Berdasarkan standar ISO (Insurance Service Office) Ketentuan aman untuk perlindungan kebakaran yaitu:
  - a. Mobil Pemadam berjarak 2,4 Km dari bangunan
  - b. Mobil Tangga berjarak 4 Km dari bangunan
  - c. Untuk setiap bangunan terjauh berjarak 8 km dari Pos Kebakaran

Untuk Kabupaten Sidoarjo saat ini jangkauan pelayanan pemadam kebakaran dalam gambar berikut :

Gambar 6. Peta jangkauan Layanan Pos Pemadam Kebakaran



### 3) Identifikasi Tingkat Aksesibilitas Jaringan Jalan

Skala pelayanan pos pemadam kebakaran merupakan faktor penting karena terkait oleh waktu tempuh dalam penanganan bencana kebakaran. Berdasarkan KEPMEN PU no.11/kpts/2000: Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (Responsetime) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut. Pos pemadam kebakaran sesuai dengan wilayah layanan penanggulangan bencana kebakaran harus memenuhi waktu tempuh pelayanan cepat tanggap penanggulangan bencana kebakaran maksimal sebesar 15 menit. Cepat tanggap 15 menit yang dimaksud merupakan waktu maksimal petugas pemadam kebakaran dari tahap awal sampai dengan gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran.

Cepat tanggap 15 menit petugas pemadam kebakaran terbagi atas 3 tahap, 5 menit pertama merupakan tahap persiapan, 5 menit kedua merupakan tahap perjalanan (dari pos menuju lokasi kejadian kebakaran), tahap ketiga merupakan tahap gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran. Untuk itu di perlukan analisis aksesibilitas jaringan jalan agar

dapat ditentukan jalan yang akan di lalui ketika terjadi kebakaran di suatu tempat. Aspek aksesibilitasnya terdiri dari jarak tempuh, kecepatan tempuh dan waktu tempuh. Berdasarkan rumus matematika berikut dapat di tentukan nilai kecepatan, waktu tempuh dan jaraknya.

Rumus :  $v = \frac{s}{t}$

Dengan ketentuan:

□  $s$  = Jarak yang ditempuh (m, km)

□  $v$  = Kecepatan (km/jam, m/s)

□  $t$  = Waktu tempuh

(jam,sekon) Catatan:

1. Untuk mencari jarak yang ditempuh, rumusnya adalah

$$s = v \times t$$

2. Untuk mencari waktu tempuh, rumusnya adalah

$$t = \frac{s}{v}$$

3. Untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah

$$v = \frac{s}{t}$$

Kecepatan tempuh pada ruas jalan yang memiliki hirarki lingkungan diasumsikan 10km/jam dimana asumsi ini dikutip dari peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006. Peraturan tersebut berbunyi “ j a lingkungan adalah jalan yang dibangun dengan kecepatan rencana 10 k m / j a m ” . K t e m p u h p a t a n pada hirarki lokal sekunder yang tidak terdapat pada data dinas perhubungan diasumsikan dengan kecepatan rata rata pada hirarki lokal sekunder yaitu sebesar 31,9 km/jam.

Tabel 13. Waktu Tempuh Berdasarkan Jarak Jangkauan

No	Jarak Jangkauan(km)	Kecepatan(km/jm)	Waktu Tempuh (menit)
1	25	30	5
2	5	30	10
3	75	30	15

Gambar 7. Peta Ruas jalan



#### 4) Identifikasi Sumber Air

Berdasarkan kondisi air, di Kabupaten Sidoarjo ada dua jenis rasa air yaitu air asin dan tawar. Total ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan air asin yaitu seluas 163,13 Km<sup>2</sup> dan 10 Kecamatan lainnya murni air tawar. Air dan pemadaman kebakaran akan selalu bersama-sama. Secara global, air merupakan sumber daya kita yang berlimpah. Harganya murah. Ketika sistem air publik diadakan, pasokan airnya tersedia hampir tak pernah kehabisan. Ketikadipergunakan dengan cermat, air sangat efektif menyerap panas dan memadamkan berbagai kebakaran.

Untuk alasan ini, organisasi pemadam kebakaran di seluruh dunia mendasarkan operasi utamanya dengan penggunaan air sebagai bahan pemadaman api kebakaran. Sistem pasokan air publik dan hidran kebakaran melibatkan belanja modal yang tidak sedikit, namun masa pakainya secara tipikal berakhir antara 70 s/d 100 tahun. Sebuah sistem pasokan air publik dan hidran kebakaran yang dirancang dan dipasang secara cermat adalah sebuah investasi jangka panjang dalam rangka keselamatan komunitas dan sudah seharusnya menerapkan perencanaan jangka panjang dan standar keteknikan yang tepat. Pasokan air yang cukup untuk mengatasi bahaya kebakaran serta transportasi yang menunjang merupakan komponen-komponen yang sangat vital dalam perencanaan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

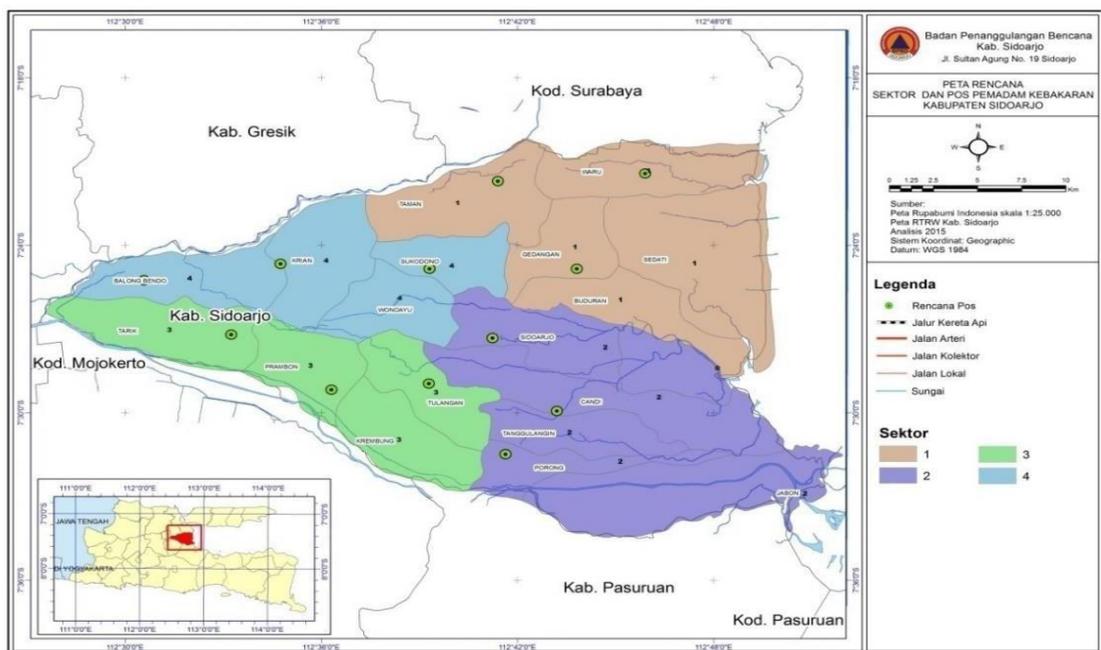
Tabel 14. Luas Wilayah Berdasarkan Kondisi Air (Ha)

No	Kecamatan	Daerah Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 - 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
1	Sidoarjo	4063,62	308,14	-	-	6.256
2	Buduran	1.822,50	17,50	-	701,75	4.102,50
3	Candi	667,25	491,30	-	-	4.066,75
4	Porong	-	14,26	75,50	-	2.982,25
5	Krembung	-	17,00	12,00	-	2.955,00
6	Tulangan	-	48,00	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	640,75	21,25	-	-	3.229,00
8	Jabon	4.080,75	216,05	27,00	456,00	8.099,75
9	Krian	-	265,75	-	-	3.250,00
10	Balongbendo	-	30,00	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	-	71,50	-	-	3.392,00
12	Tarik	-	8,75	-	-	3.606,00
13	Prambon	-	64,25	-	-	3.422,50

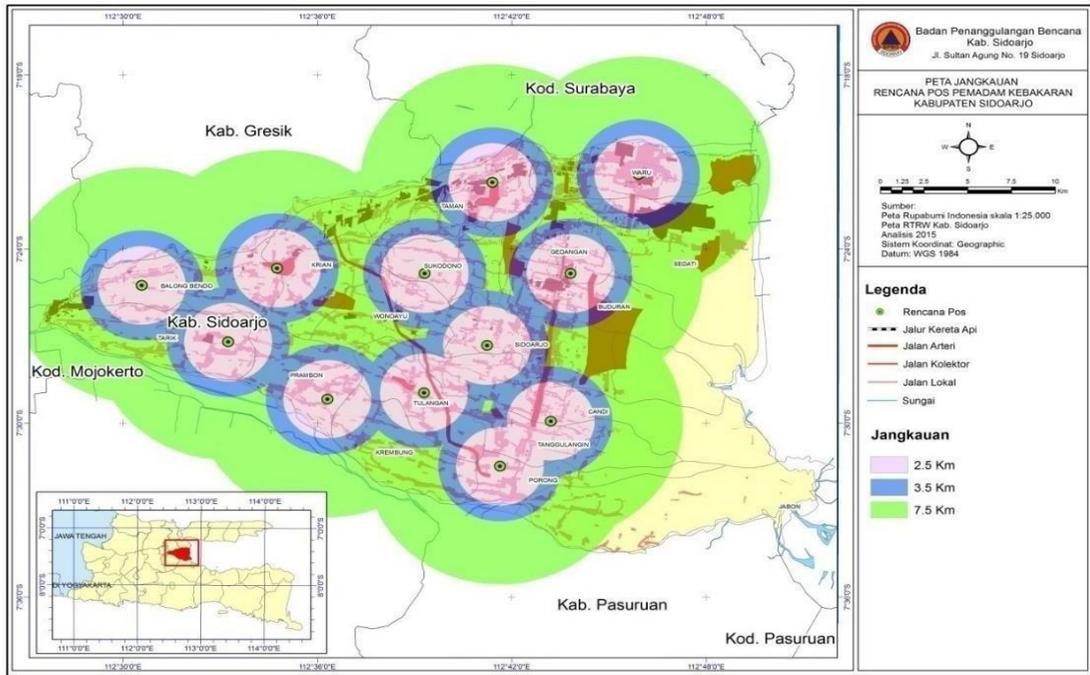


Jumlah pos pemadam Kebakaran yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan akan pelayanannya akibat pesatnya pembangunan kota dan daerah pinggirannya. Banyak kasus kebakaran yang terjadi mengakibatkan api lebih dahulu membakar isi bangunan dan menjalar ke bangunan-bangunan sekitar sebelum pasukan pemadam tiba di lokasi, jika dilihat dari waktu kedatangan sejak diterima informasi bisa mencapai lebih dari 15 menit sehingga banyak korban serta kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, kebutuhan akan pelayanan publik/emergency membutuhkan jumlah yang proporsional dengan kebutuhannya dan merata bagi setiap orang, baik kaya/miskin, tinggal di pusat kota/pinggiran. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui survei berbagai variabel diatas , maka diperlukan penambahan pos pemadam kebakaran di beberapa tempat. Rencana letak pos pemadam kebakaran yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah di wilayah Sektor Pemadam Kebakaran yang padat pemukiman dan pabrik. Dan dari sektor - sektor tersebut membawahi beberapa Pos Pemadam Kebakaran.

Gambar 10. Peta Rencana Usulan WMK, Sektor dan Pos



Gambar 11. Peta Rencana Jangkauan Usulan WMK, Sektor dan Pos



Sesuai dengan Standar perletakan pos pemadam kebakaran :

3. Berdasarkan Kepmen PU No.11/KPTS/2000 Ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan, yaitu:
    - a. Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 7,5 km dari sektor.
    - b. 1 (satu) pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan.
    - c. Berdasarkan standar ISO (Insurance Service Office) Ketentuan aman untuk perlindungan kebakaran yaitu:
      - a. Mobil Pemadam berjarak 2,4 Km dari bangunan
      - b. Mobil Tangga berjarak 4 Km dari bangunan
      - c. Untuk setiap bangunan terjauh berjarak 8 km dari Pos Kebakaran
- Dari table di bawah ini dapat diketahui bahwa di Kabupaten Sidoarjo terdapat 18 Kecamatan dengan 322 Desa dan 31 Kelurahan.

Tabel 15. Jumlah Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Sidoarjo	10	14	10	Balongbendo	20	0
2	Buduran	15	0	11	Wonoayu	23	0
3	Candi	24	0	12	Tarik	20	0
4	Porong	13	6	13	Prambon	20	0

5	Krembung	19	0	14	Taman	16	8
6	Tulangan	22	0	15	Waru	17	0
7	Tanggulangin	19	0	16	Gedangan	15	0
8	Jabon	15	0	17	Sedati	16	0
9	Krian	19	3	18	Sukodono	19	0
<b>Jumlah Tot</b>						<b>322</b>	<b>31</b>
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2019							

Berdasarkan Kepmen PU No.11/KPTS/2000 Ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan, yaitu:

- a) Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 7,5 km dari sektor.
- b) 1 (satu) pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan.

Dari Kepmen di atas agar jangkauan layanan pos pemadam kebakaran dapat terpenuhi, maka wilayah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai 322 desa dan kelurahan akan di bagi 4 sektor pemadam kebakaran dengan masing-masing sektor terdiri atas 4 pos pemadam kebakaran sehingga dapat memenuhi jangkauan layanannya untuk setiap wilayahnya masing masing. Berdasarkan analisis tersebut Kabupaten Sidoarjo akan dibagi menjadi:

Tabel 16. Sektor di Kabupaten Sidoarjo

No. Sektor	Wilayah	Pos
I	Kec. Waru, Taman, Gedangan, Sedati Buduran	3 pos (Taman, Waru, Buduran)
II	Kec. Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Porong	3 Pos (Sidoarjo, Candi, Porong)
III	Kec. Tulangan, Krembung, Prambon, Tarik	3 (Tulangan, Prambon, Tarik)
IV	Kec. Balongbendo, Krian, Sukodono, Wonoayu	3 (Balongbendo, Krian, Sukodono)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mengatur bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan Penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ada di daerah kabupaten Sidoarjo,

mempunyai tugas melaksanakan menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas khusus yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPBD menghadapi berbagai permasalahan yang tentunya membutuhkan adanya alternatif-alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. BPBD Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan SPM ;
2. Struktur organisasi belum mencerminkan implementasi Inmendagri nomor 90 tahun 2019 ;
3. Penanganan Pandemi Covid-19 yang memerlukan koordinasi lintas sektoral secara kontinu dan berkelanjutan;
4. Struktur organisasi belum mendukung pelaksanaan SPM, baik kebencanaan maupun Pemadam Kebakaran ;,
5. Kualitas SDM yang belum mendukung kegiatan ;
6. Belum terjalinya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga / OPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan;
7. Kurang tersedianya sarana prasarana / peralatan penunjang kebencanaan termasuk pemadam kebakaran;
8. Terbatasnya jumlah personil pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
9. Pelatihan-Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan masih lemah;
10. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan BPBD masih perlu peningkatan;
11. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan masih perlu peningkatan;
12. Sistem administrasi, pengelolaan logistik dan keuangan perlu ditingkatkan.
13. Minimnya pengetahuan serta rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;
14. Minimnya sumber daya, sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana;
15. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
16. Kurangnya penyampaian informasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana;

17. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia dalam Pengurangan Resiko Bencana.
18. Potensi ancaman bencana tahunan dalam bentuk kebakaran, banjir, puting beliung dan kekeringan serta potensi ancaman bencana lainnya yang bersinggungan dengan kondisi geografis dan wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagai pusat industri dan kawasan penyangga, antara lain :
  - a. Wabah Penyakit/Pandemi Covid-19
  - b. Banjir bandang dan rob
  - c. Konflik sosial
  - d. Kegagalan teknologi
  - e. Gerakan tanah/longsor

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

---

Visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Sidoarjo Yang Mandiri dan Sejahtera”**. Makna dari visi p  
Kabupaten Sidoarjo tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien
2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan murah kepada masyarakat
3. Peningkatan pelayanan umum (*Public Service*) meliputi peningkatan infrastruktur, peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi, serta peningkatan pelayanan sosial budaya
4. Mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat
5. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai peranan di dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi daerah khususnya pada Misi ke 1 “Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban” yaitu dengan menciptakan rasa aman dan tertib terhadap masyarakat di Kabupaten Sidoarjo melalui tindakan kepedulian dan kemanusiaan melalui penanganan bencana alam.

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA

---

Analisa Rencana Strategis dari Kementerian, Lembaga dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) diharapkan memberikan keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis dari OPD Kabupaten Sidoarjo terhadap sasaran Renstra K / L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing OPD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Renstra tentunya tidak dapat lepas dari rencana strategis BNPB maupun BPBD Provinsi Jawa Timur. Seperti tertera pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 19 ayat 2 yang menentukan bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan tujuan untuk memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD. Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dari BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur yang kemudian dijadikan acuan dalam penentuan indikator kinerja BPBD Kabupaten Sidoarjo.

Terkait hal tersebut penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan analisis dan komparasi capaian sasaran Renstra sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini.

Tabel 17. Capaian Sasaran Renstra

No	Sasaran Kinerja BPBD Kab. Sidoarjo	Indikator Kinerja BPBD Kab. Sidoarjo	Sasaran pada Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	1. Jumlah SDM/Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	1. Menurunnya risiko bencana di Jawa Timur	1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah
		2. Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	2. Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana pada saat pra, tanggap dan transisi bencana di Jawa Timur	2. Terwujudnya sisten penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien
		3. Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	3. Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur	3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik disbanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan

				koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan
--	--	--	--	--

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Sidoarjo berkembang menjadi wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan. Arah pengembangan wilayah Jawa Bali (termasuk Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo) sebagai pusat pengembangan utama sentra pangan nasional, pengembangan sumberdaya alam yang hemat ruang (intensif) terutama perikanan tangkap darat, perkebunan dengan agrotourism, pertambangan migas dan non migas, pengembangan industri pengolahan yang hemat ruang dan air serta ramah lingkungan, pengembangan permukiman yang terkendali, pusat pertumbuhan utama ekonomi dan pintu gerbang utama global dan nasional termasuk pelayanan pemerintahan nasional. Kawasan ekonomi Potensial di Kabupaten Sidoarjo yang diarahkan dalam RTRW Propinsi adalah Kapuk (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi). Berikut merupakan isu strategis terkait RTRW dan KLHS.

Tabel 18. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5

	Adanya dampak luapan lumpur lapindo di Kecamatan Porong dan Tanggulangin yang secara tidak langsung mengubah tata guna lahan dan struktur ruang Kabupaten Sidoarjo	Belum optimalnya pengelolaan area terdampak lumpur Sidoarjo	Pengaliran lumpur ke Kali Porong menimbulkan dampak lain terhadap lingkungan	BPBD mendorong untuk peningkatan koordinasi dengan instansi terkait yaitu DLHK dan BPLS
--	--	---	--	---

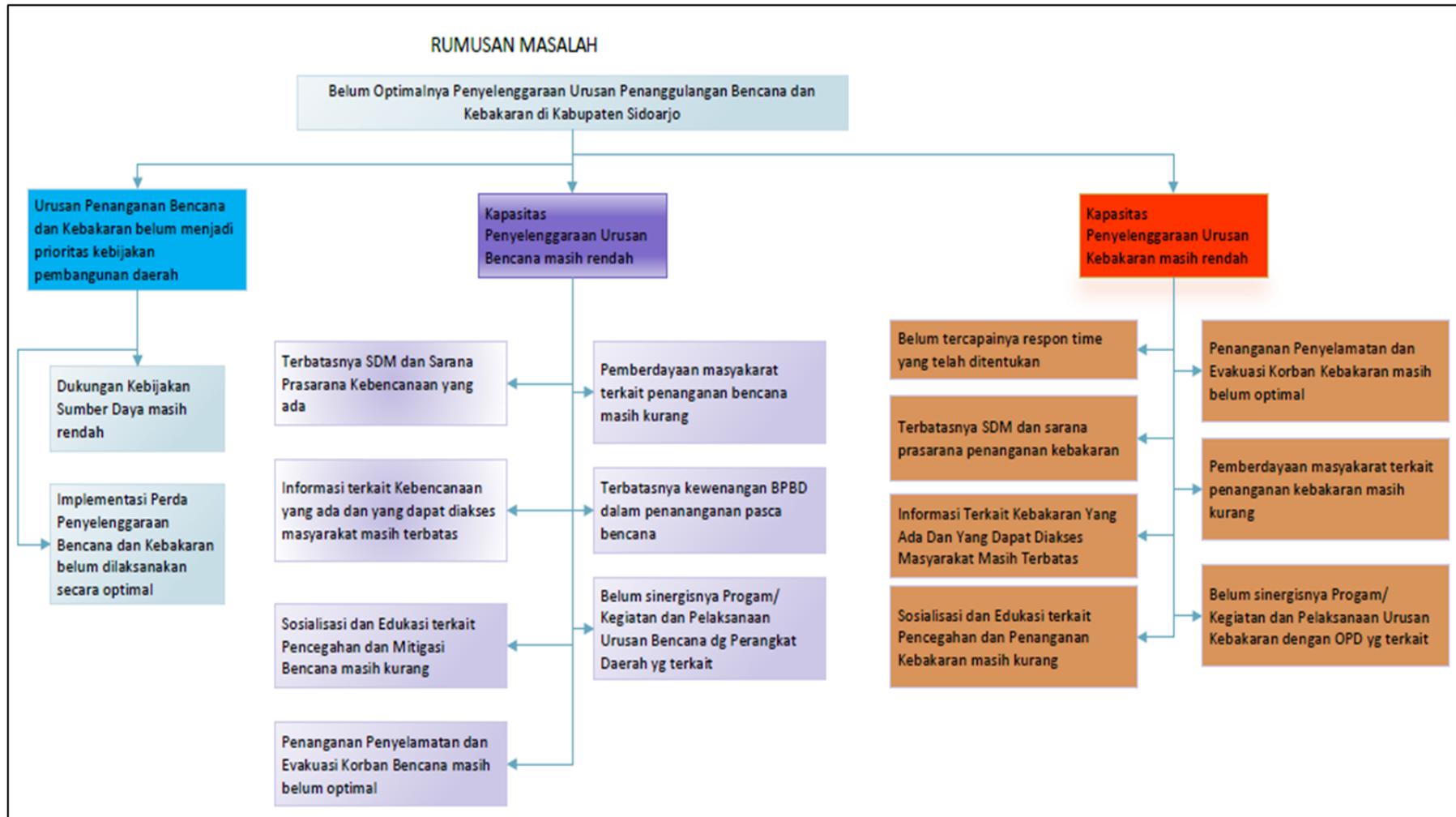
Tabel 19. Telaah Kajian Lingkungan Strategis Kabupaten Sidoarjo

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Penurunan kualitas lingkungan akibat pertumbuhan aktivitas permukiman industri perdagangan jasa transportasi (Pencemaran)	Semakin banyaknya jumlah kegiatan usaha yang membuang limbah menyebabkan daya tampung beban sungai semakin menurun sehingga perlu kajian daya dukung dan daya tampung beban pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan lingkungan terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat yang berdomisili di sekitar sungai</li> </ul>	BPBD berkoordinasi dan melakukan sinergi dengan OPD terkait yaitu DLHK dan BPLS
		Perlunya meninjau kembali waktu dan tempat pelaksanaan uji kualitas udara ambien	Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten	Adanya informasi dari pedoman IKLH terkait penentuan kawasan pelaksanaan uji kualitas udara ambien
		Perlunya meninjau kembali titik pantau uji kualitas Air Badan Air di sungai (Afvour dan Kanal)	Kurangnya informasi data usaha/ kegiatan yang berada di sekitar sungai (Afvour dan Kanal) - Kualitas air sungai Kab. Sidoarjo masih belum memenuhi target penurunan konsentrasi BOD	Meningkatnya koordinasi antara BPBD dengan instansi dalam penentuan titik pantau
		Perlunya peningkatan pengawasan seiring dengan pertumbuhan industri yang semakin pesat	Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan belum ada jabatan fungsional Bidang Lingkungan Hidup	Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan Limbah B3 serta pembuangan air limbah - Semakin tingginya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan/atau industri serta berbagai sektor instansi terhadap

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan menuntut penyelesaian yang lebih professional	Terkadang pengaduan yang diajukan lebih pada permasalahan sosial dibanding permasalahan pencemaran lingkungan	BPBD meningkatkan koordinasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan PD/instansi terkait, pelaku usaha, LSM dan masyarakat
2	Tingginya alih fungsi lahan dan adanya pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan teknis	Informasi keberadaan RTH di Kab. Sidoarjo yang jauh dari proporsi ideal sehingga perlu kajian atau inventarisasi RTH	Kurang tegasnya PD/instansi penanggung jawab pengelolaan RTH di Kab. Sidoarjo	Adanya Masterplan RTH Kab. Sidoarjo
		Semakin tingginya potensi kerusakan lahan/tanah kering di Kab. Sidoarjo	Semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (permukiman, industri, perdagangan/jasa, transportasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemkab Sidoarjo lebih selektif terhadap persetujuan pemanfaatan ruang dan ijin lokasi</li> <li>• Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti tercantum dalam Perda RTRW 2009- 2029</li> </ul>
		Tingginya alih fungsi lahan dan adanya pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan teknis (Tata ruang)	Lemahnya pengawasan terhadap tata ruang	Peningkatan jumlah ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo
3	Sampah/Limbah B3, Air tanah, Kualitas permukiman/	Penurunan kualitas lingkungan akibat pertumbuhan aktivitas permukiman, industri, perdagangan, jasa, transportasi (Pencemaran)	Semakin bertambahnya pemukiman dan industri	Peningkatan jumlah TPA dan Sarana prasarana pengelolaan sampah

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Kawasan Pesisir, Air Sungai dan air Baku, kualitas udara			

Gambar 12. Identifikasi Permasalahan di BPBD



## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari pernyataan, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Dengan berlandaskan Misi yang telah ditetapkan, maka BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam kurun tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Untuk mewujudkan visi dan khususnya misi Kepala Daerah Sidoarjo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tujuan yaitu meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Meningkatnya kapasitas penanganan bencana.
2. Meningkatnya kapasitas penanganan kebakaran.

Adapun indikator kinerja atas tujuan startegis yang dijadikan alat ukur keberhasilan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Resiko Bencana (IRB)

Secara umum perhitungan Indeks Risiko Bencana didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Semakin turun

skor IRB semakin baik penanganan bencana suatu daerah. Perhitungan skor IRB dilakukan dengan melaksanakan forum diskusi grup / *Forum Group Discussion (FGD)* yang melibatkan seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan bencana dari kalangan pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

2. Rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran

Rata-rata waktu tanggap / respon time dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan waktu yang dicapai dalam penanganan kebakaran dibagi dengan seluruh kejadian kebakaran yang ditangani.

Sedangkan indikator sasaran strategis yang dijadikan alat ukur keberhasilan dari capaian kinerjanya adalah :

1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo

Pengukuran IKD dilakukan untuk mengetahui skor kapasitas suatu daerah dalam penanganan bencana. Dari skor IKD akan dapat diketahui berapa skor Indeks Resiko Bencana (IRB).

Secara umum perhitungan Indeks Risiko Bencana didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari tiga komponen diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan representasi dari komponen kapasitas. Dengan asumsi bahwa jika kapasitasnya meningkat maka risiko bencana akan menurun. Dengan kata lain bahwa semakin tinggi skor IKD yang mewakili komponen kapasitas, maka skor Indeks Risiko Bencana akan menurun. Secara grafis, rumus Indeks Risiko Bencana sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 13. Komponen Indeks Risiko Bencana

<p><i>D i s a s t r i e s r k H a z a r d x V u l n e r a b l e</i></p> <p><i>C a p a c i t y</i></p>	<p><b>Hazard / Ancaman</b> : Ancaman / Potensi Bencana yang terjadi di sebuah daerah (sesuai UU 24/2007 ada 13 jenis ancaman bencana di Indonesia)</p>
<p><i>A n c a m a n</i></p> <p><i>K e r e n t a n a n</i></p> <p><i>K a p a s i t a s</i></p>	<p><b>Vulnerable / Kerentanan</b> : kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan bahaya / ancaman bahkan bencana yang terdiri dari kerentanan fisik, sosial, ekonomi, lingkungan dan politik</p>
	<p><b>Capacity / Kapasitas</b> : Intensitas Kemampuan Komunitas / Masyarakat dalam menghadapi ancaman dan atau bencana yang berwujud <b>Ketangguhan</b></p>

Indeks Kapasitas di peroleh berdasarkan tingkat ketahanan daerah pada suatu waktu. Tingkat Ketahanan Daerah bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian kapasitas ini. Oleh karenanya penghitungan Tingkat Ketahanan Daerah dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan Peta Ancaman Bencana pada daerah yang sama. Indeks Kapasitas diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada beberapa pelaku / stakeholder penanggulangan bencana pada suatu daerah.

## **2. Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se- Kabupaten Sidoarjo)**

Definisi Operasional :

Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (15 menit)(:) Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran x 100%

## **3. Jumlah penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan**

Definisi Operasional :

Jumlah penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan (:) Jumlah keseluruhan penanganan evakuasi dan penyelamatan x 100%

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel 20. **Tujuan** (indikator dan target tujuan) dan **Sasaran** (indikator dan target sasaran) RENSTRA BPBD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1. Indeks Resiko Bencana (IRB)	112,82	104,72	98,44	92,53	86,98	81,76	76,85	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	0,68	0,7	0,72	0,76	0,81	0,86	0,91
		2. Rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran	22,3 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	41,54%	55%	55%	60%	65%	70%	75%

										penyelamatan non kebakaran									
											Persentase penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
										Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	A	A	A	A	A	A	A
											Nilai RB	N/A	26,34						
											Nilai IPP	N/A	A-	A	A	A	A	A	A
											Nilai IKM/SKM	SANGAT BAIK							

											Persentase Serapan Anggaran PD	86,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--------	------	------	------	------	------	------

Dari data diatas, khususnya terkait dengan trend penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan bahwa trend penurunan tersebut akibat dari kenaikan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat seperti yang ditunjukkan dalam tabel diatas khususnya pada kolom ke 11 s/d 17. Pada dasarnya IKD adalah sebuah indeks yang menunjukkan kapasitas dalam formula risiko bencana yang terdiri dari fungsi *Hazard*(ancaman), *Vulnerable*(kerentanan) dan *Capacity* (Kapasitas). Perhitungan IKD didasarkan atas sejumlah pertanyaan (251 pertanyaan) dalam bentuk data diskrit atau nominal (ya dan tidak) dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas di suatu daerah sudah pernah dilakukan. Sebagai contoh, jika pada tahun 2021 IKD Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 0.7, maka dapat bermakna bahwa dari 251 pertanyaan dalam IKD telah terjawab dengan pilihan jawaban "YA" sebesar 70% atau sekitar 175,7 (176) pertanyaan tentang kapasitas yang sudah dilaksanakan. Skor KD antara 0 dan 1, sehingga angka tertingginya adalah 1 atau 100% pertanyaan dalam IKD sudah terpenuhi dan terjawab semua. Selanjutnya komponen IKD dalam formula Risiko Bencana adalah sebagai bilangan pembagi dari rumus  $R = (H \times V) / C$ . Dengan demikian jika kemudian angka kapasitasnya yang diperoleh dari IKD tinggi atau cenderung naik, maka angka Indeks Risikonya (R) akan rendah atau cenderung menurun seperti yang ditunjukkan dalam tabel diatas mulai dari kolom 4 sd 9. Dengan catatan bahwa selama ini perhitungan IRB tersebut didasarkan pada penguatan kapasitas, dan untuk indeks Hazard (ancaman) dan Vulnerable (kerentanan) ditentukan / ditetapkan dari pusat atau BNPB. Daerah, dalam hal ini BPBD Kab/Kota di seluruh Indonesia hanya diminta untuk mengukur kapasitas melalui IKD. Dengan kata lain bahwa ancaman dan kerentanan adalah unsur-unsur yang tidak bisa dihindari dan cenderung tetap. Namun untuk dapat mengurangi risiko terhadap keberadaan elemen ancaman dan kerentanan yang ada, maka BPBD dan pihak terkait lainnya yang terbangun dalam kolaborasi pentahelix penanggulangan bencana yakni pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan media, harus melakukan sinergi dan atau kerjasama yang mutualistis dalam upaya meningkatkan kapasitas di masing-masing daerah.



## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

Strategi dan Arah Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah merupakan penerjemahan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai organisasi induk. Disamping itu strategi dan arah kebijakan BPBD kabupaten Sidoarjo juga mengacu kepada Renstra BPBD Jawa Timur dan BNPB pusat sebagai organisasi Pembina. Sehingga Arah dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, BPBD Jawa Timur, dan BNPB Pusat digunakan sebagai acuan di dalam perumusan arah kebijakan dan strategi BPBD Kabupaten Sidoarjo ini.

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2022 – 2026 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Program yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo. Strategi dan Arah kebijakan ditunjukkan pada tabel 21.

Tabel 21. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Sidoarjo

<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan</b>				
<b>Misi : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
Meningkatnya kualitas Penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Meningkatnya kapasitas Penanganan bencana	a. Meningkatkan Pelayanan informasi rawan bencana	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini	
		b. Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan regulasi / kebijakan daerah terkait penanggulangan bencana, Perumusan dokumen teknis kebencanaan sebagai dasar Langkah Pengurangan Resiko Bencana (PRB), peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam PB, serta Inisiasi kerjasama daerah dalam penanggulangan bencana	
		c. Meningkatkan Pelayanan, Penyelamatan, dan evakuasi korban bencana	Peningkatan peran serta /partisipasi masyarakat serta pemenuhan sarana prasarana untuk pendukung penyelamatan, dan evakuasi korban bencana	
	Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Peningkatan Kerjasama dengan pihak luar dalam pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran
			Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya	Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran baik formal maupun informal
			Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kebakaran berbasis komunitas
			Peningkatan kapasitas aparatur penyelamatan dan evakuasi	Peningkatan kapasitas aparatur penyelamatan dan evakuasi baik formal maupun informal
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah		Peningkatan Implementasi SAKIP	Meningkatkan kinerja OPD yang akuntabel, penerapan SPIP
			Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan budaya kinerja berbasis reformasi birokrasi
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui inovasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan sesuai Tugas dan Fungsi			Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksi OPD	
Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan			Melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dengan optimalisasi anggaran agar efisien dan tepat sasaran	

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

---

Target Kinerja merupakan penjelasan mengenai hasil yang menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja. Kegiatan Target Kinerja yang disusun relevan dengan indikator kinerjanya, bersifat logis, dan berdasarkan pada baseline data yang jelas. Target Kinerja juga sebagai target Penetapan Kinerja dan Sasaran Kinerja pimpinan BPBD yang akan dicapai pada setiap tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada seluruh pegawai pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melalui penjabaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026. Penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 22. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2026

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output / subkegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1. Program Penanggulangan Bencana	Indikator Program:	1. Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan 2. Persentase korban bencana yang ter rehabilitasi 3. Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi berdasarkan laporan Jitupasn a	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 100% 100% 100% 100%	9,342, 387,9 81	1. 100% 2. 100% 3. 100%	10,380 ,431,0 90	1. 100% 2. 100% 3. 100%	13,214 ,682,1 47	1. 100% 2. 100% 3. 100%	9,37 4,18 4,17 4	1. 100% 100% 100% 100%	10,3 11,6 02,5 91	1. 100% 2. 100% 3. 100%	11,342, 762,85 0	1. 100% 2. 100% 3. 100%	11,342,762,8 50

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Persentase warga di daerah rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	100%	817,760,400	100%	908,622,756	100%	1,020,962,890	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	115,500,000	0	214,778,580	0	257,734,296	1 dokumen	309,281,155	0	371,137,386	0	445,364,863	2 dokumen	445,364,863
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	40 orang	160 orang	764,424,558	450 orang	693,844,176	500 orang	763,228,594	500 orang	839,551,453	500 orang	923,506,598	500 orang	1,015,857,258	2610 orang	1,015,857,258

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output ) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Indikator : 1. Persentase peserta peningkatan kapasitas masyarakat/apar atur di daerah rawan bencana; 2. Persentase warga yang mendapat peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana	1. 10% 2. 100%	1. 10%	9,137, 854,3 11	1. 15% 2. 100%	7,681, 191,38 4	1. 20% 2. 100%	8,771, 985,61 2	1. 25% 2. 100%	9,37 4,18 4,17 4	1. 30% 2. 100%	10,3 11,6 02,5 91	1. 35% 2. 100%	11,342, 762,85 0	1. 35% 2. 100%	11,342,762,8 50
Penyusunan Rencana Penanggula ngan Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah Dokume n Rencana Penangg ulangan Bencana yang Dilegalis asi	1 dokumen	1 dokum en	440,0 00,00 0	0	-	1 dokume n	250,00 0,000	0	-	0	-	0	-	1 dokume n	-
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikut i Pelatiha n Pencega han dan	0 orang	500 orang	549,8 82,85 9	150 orang	364,80 4,255	150 orang	401,28 4,681	150 orang	441, 413, 149	150 orang	485, 554, 463	150 orang	534,10 9,910	750 orang	534,109,910

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Mitigasi Bencana																
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiaga an terhadap Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah Dokume n Hasil Pengend alian Operasi dan Penyedi aan Sarana Prasaran a Kesiapsi agaan Terhada p Bencana Kabupat en/Kota	N/A	6 kegiat an	4,009, 356,9 23	6 dokumen	5,058, 604,74 1	6 dokume n	5,564, 465,21 5	6 dokume n	6,12 0,91 1,73 7	6 dokume n	6,73 3,00 2,91 0	6 dokume n	7,406,3 03,201	36 dokume n	7,406,303,20 1	
	Penyediaan Peralatan Perlindunga n dan Kesiapsiaga an terhadap Bencana	Jumlah Peralata n Penyela matan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga , maupun Petugas	0%	30 unit	248,9 00,54 1	40 unit	146,04 1,338	50 unit	160,64 5,472	55 unit	176, 710, 019	55 unit	194, 381, 021	55 unit	213,81 9,123	285 unit	213,819,123	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/K ota		Jumlah Dokume n Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pemban gunan yang Mempun yai Risiko Tinggi Menimb ulkan Bencana	1 dokumen	1 dokum en 110,0 00,00 0	1 dokumen	131,89 5,240	1 dokume n	145,08 4,764	1 dokume n	159, 593, 240	1 dokume n	175, 552, 564	1 dokume n	193,10 7,821	6 dokume n	193,107,821
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiaga an		Jumlah Kawasa n yang Ditingkat kan Kapasita snya dalam Pencega han dan Kesiapsi agaan Bencana	11 desa	4 desa 2,689, 777,6 40	2 desa	618,80 7,498	2 desa	680,68 8,248	2 desa	748, 757, 073	2 desa	823, 632, 780	2 desa	905,99 6,058	14 desa	905,996,058
	Pengemban gan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/K ota		Jumlah Personil TRC yang Dikemba ngkan Kapasita s Teknis	20 orang	50 orang 148,7 55,60 0	50 orang	272,73 1,619	50 orang	300,00 4,781	50 orang	330, 005, 259	50 orang	363, 005, 785	50 orang	399,30 6,363	300 orang	399,306,363

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			dan Manajeri lainnya															
	Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen Renkon (banjir)	0	0	4 dokumen	371,88 2,748	4 dokumen	409,07 1,023	4 dokumen	449, 978, 125	4 dokumen	494, 975, 938	4 dokumen	544,47 3,531	20 dokumen	544,473,531
	Gladi Kesiapsiaga an terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsi agaan	600 orang	0	0	250 orang	716,42 3,945	250 orang	788,06 6,340	1000 orang	866, 872, 973	1000 orang	953, 560, 271	1000 orang	1,048,9 16,298	5000 orang	1,048,916,29 8
	Penyusunan Rencana Penanggula ngan Kedaruratan Bencana		Jumlah Dokumen Rencana Penanggu langan Kedarur atan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	N/A	0 dokumen	0	0	-	1 dokumen	72,675 ,090	1 dokumen	79,9 42,5 99	1 dokumen	87,9 36,8 59	1 dokumen	96,730, 545	4 dokumen	96,730,545

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatiha n Keluarga Tanggap Bencana Alam	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	150 orang	250, 000, 000	150 orang	277, 500, 000	150 orang	305,25 0,000	450 orang	305,250,000
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Indikator : Persentase petugas dan relawan yang aktif dalam masa status Siaga dan darurat bencana	1. 100% 2. 8 orang	100%	1,010, 156,2 86	100%	1,460, 666,95 0	100%	1,606, 733,64 5	100%	1,76 7,40 7,01 0	100%	1,94 4,14 7,71 0	1. 100% 2. 10 orang	2,138,5 62,481	100%	2,138,562,48 1
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wa bah Zoonosis Prioritas		Jumlah Laporan Koordina si Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit /Wabah Prioritas	N/A	N/A	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/K ota		SK Penetap an Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapk an Paling Lama 1x24 Jam berdasar kan Hasil Dokume n Laporan Kaji Cepat	100%	100%	100,4 50,00 0	100%	212,10 0,000	100%	233,31 0,000	100%	256, 641, 000	100%	282, 305, 100	100%	310,53 5,610	100%	310,535,610
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/K ota		Persenta se Jumlah Korban yang Berhasil Ditemuk an, Ditolong, dan Dievaku asi Per Jenis Kejadian Bencana	100%	100%	70,00 0,000	100%	15,000 ,000	100%	16,500 ,000	100%	18,1 50,0 00	100%	19,9 65,0 00	100%	21,961, 500	100%	21,961,500

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	839,706,286	100%	873,566,950	100%	960,923,645	100%	1,057,016,010	100%	1,162,717,610	100%	1,278,989,371	100%	1,278,989,371
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 laporan	2 laporan	0	2 laporan	360,000,000	2 laporan	396,000,000	2 laporan	435,600,000	2 laporan	479,160,000	2 laporan	527,076,000	12 laporan	527,076,000
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan	0	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		-

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Paling Lama 1x24 Jam berdasar kan Hasil Dokume n Laporan Investiga si KLB dan Epidemi ologi Terpadu															
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulan Bencana		Indikator : 1. Persentase dokumen PB dan regulasi PB yang dilegal / formalkan 2. Persentase laporan pertanggungjawa ban penyelenggaraan PB yang terselesaikan	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	124,8 50,00 0	1. 100% 2. 100%	329,95 0,000	1. 100% 2. 100%	1,815, 000,00 0	1. 100% 2. 100%	1,99 6,50 0,00 0	1. 100% 2. 100%	2,19 6,15 0,00 0	1. 100% 2. 100%	4,790,5 65,000	1. 100% 2. 100%	#VALUE!
	Penyusunan Regulasi Penanggula ngan Bencana Kabupaten/K ota		Jumlah Dokume n Regulasi Penduku ng Penyele nggaraan	1 dokumen	N/A	0	N/A	179,95 0,000	1 dokume n	125,00 0,000	1 dokume n	137, 500, 000	1 dokume n	151, 250, 000	1 dokume n	166,37 5,000	4 dokume n	760,075,000

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		n Penangg ulangan Bencana di Daerah																
	PenguatanK elembagaan Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah Dokume n Tata Kelola Kelemba gaan Bencana Daerah	N/A	N/A	0	N/A	-	1 dokume n	1,200, 000,00 0	1 dokume n	1,32 0,00 0,00 0	1 dokume n	1,45 2,00 0,00 0	3 dokume n	3,972,0 00,000	2 dokume n	7,944,000,00 0	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggula ngan Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah Dokume n Kerja Sama antar Lembag a dan Kemitraa n dalam Penangg ulangan Bencana	N/A	N/A	0	N/A	-	1 dokume n	250,00 0,000	1 dokume n	275, 000, 000	1 dokume n	302, 500, 000	1 dokume n	332,75 0,000	4 dokume n	1,160,250,00 0	
	Pengelolaan dan Pemanfaata n Sistem Informasi Kebencanaa n	Jumlah Data dan Informasi Kebencana n	2 sistem	N/A	0	3 buah	150,00 0,000	3 buah	165,00 0,000	3 buah	181, 500, 000	3 buah	199, 650, 000	3 buah	219,61 5,000	15 buah	915,765,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg araan Penanggula	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyele nggaraan	N/A	N/A	0	N/A	-	1 laporan	75,000 ,000	1 laporan	82,5 00,0 00	1 laporan	90,7 50,0 00	1 laporan	99,825, 000	4 laporan	348,075,000	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	ngan Bencana			n Penangg ulangan Bencana														
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/K ota			Jumlah Dokume n Penanga nan Pasca Bencana Kabupat en/Kota Melalui Pengkaji an Kebutuh an Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilit asi dan Rekonstr uksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen	1 dokum en 875,0 00,00 0	1 dokumen	1,006, 250,00 0	1 dokume n 1,157, 187,50 0	1 dokume n 1,33 0,76 5,62 5	1 dokume n 1,53 0,38 0,46 9	1 dokume n 1,759,9 37,539	6 dokume n 7,659,521,13 3					

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
<b>2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Indikator Program : 1. Persentase satuan petugas Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi 2. Persentase mobil Pemadam Kebakaran dengan kondisi layak fungsi</b>	1. 32% 2. 80%	1. 40% 2. 80%	24,05 2,861,296	1. 40% 2. 80%	19,040 ,483,737.00	1. 45% 2. 80%	24,859 ,015,018.75	1. 50% 2. 80%	31,107,113,773,44	1. 55% 2. 85%	38,657,305,166,80	1. 60% 2. 85%	48,072,582,333.00	1. 60% 2. 85%	185,789,361,325
Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo	100%	100%	23,74 1,359,320	100%	18,866 ,012,015	100%	23,605 ,765,019	100%	29,694,706,273	100%	37,092,632,842	100%	46,336,096,052	100%	179,336,571,521
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanganan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	0	1 dokumen	90,000 ,000	1 dokumen	125,75 0,000	1 dokumen	157,187,500	1 dokumen	196,484,375	1 dokumen	245,605,469	4 dokumen	815,027,344

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Setiap Tahunnya																
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	400,000,000	12 laporan	439,550,000	12 laporan	549,437,500	12 laporan	686,796,875	12 laporan	858,496,094	12 laporan	1,073,120,117	72 laporan	4,007,400,586	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi	12 laporan	12 laporan	7,269,333,023	12 laporan	5,247,473,625	12 laporan	6,559,342,031	12 laporan	8,199,177,539	100%	10,248,971,924	12 laporan	12,811,214,905	72 laporan	50,335,513,047	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/K ota		Jumlah Dokume n Hasil Pelaksa naan Kegiatan Pengend alian Bahan Berbaha ya dan Beracun (B3) dan Penanga nan Kebakar an yang Disebab kan B3 dalam Daerah Kabupat en/Kota	100%	100%	0	0%	-	0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggula ngan Kebakaran		Jumlah Dokume n Hasil Pelaksa naan Kegiatan Standari sasi	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dan Alat Pelindung Diri		Sarana dan Prasaran a Pencega han, Penangg ulangan Kebakar an dan Alat Pelindun g Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal														
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggula ngan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasaran a Untuk Pencega han dan Penangg ulangan Kebakar an dan Alat Pelindun g Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar	5 Paket	5 paket 9,229, 682,2 97	5 Paket	6,271, 244,39 0	15 Paket	7,839, 055,48 8	10 Paket	9,79 8,81 9,35 9	15 Paket	12,2 48,5 24,1 99	10 Paket	15,310, 655,24 9	60 Paket	60,697,980,9 82

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Teknis Terkait																
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	28%	50%	6,842, 344,0 00	50%	6,817, 744,00 0	55%	8,522, 180,00 0	60%	10,6 52,7 25,0 00	65%	13,3 15,9 06,2 50	75%	16,644, 882,81 3	75%	62,795,782,0 63
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Jumlah Desa/Kel urahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyela	N/A	N/A	0	N/A	-	N/A	-	2 desa	175, 000, 000	2 desa	194, 250, 000	2 desa	215,61 7,500	6 desa	584,867,500

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			matan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaha rui atau Dimutak hirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelan jutan dan <i>Real Time</i> yang Dimiliki Oleh Desa/Kel urahan Setiap Tahunny a	N/A	N/A	0	N/A	-	1 dokume n	10,000 ,000	1 dokume n	25,0 00,0 00	1 dokume n	30,0 00,0 00	1 dokume n	35,000, 000	4 dokume n	100,000,000

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran															
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														-	
																	-	
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase sarana proteksi kebakaran bangunan/gedung yang memenuhi standar	100%	100%	140,0 00,00 0	100%	115,00 0,000	100%	133,25 0,000	100%	152, 407, 500	100%	172, 572, 325	100%	193,85 5,281	100%	907,085,106
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Banguna	100%	100%	90,00 0,000	100%	40,000 ,000	100%	50,000 ,000	100%	60,0 00,0 00	100%	70,0 00,0 00	100%	80,000, 000	100%	390,000,000

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Banguna n/Gedun g/Lingku ngan yang Memenu hi Kelaikan Standar Sarana Prasaran a Proteksi Kebakar an	1 dokumen	1 dokumen 50,00 0,000	1 dokumen	75,000 ,000	1 dokumen	83,250 ,000	1 dokumen	92,4 07,5 00	1 dokumen	102, 572, 325	1 dokumen	113,85 5,281	6 dokumen	517,085,106	
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran		Persentase kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi pasca	100%	100% 10,00 0,000	100%	-	100%	-	100%	25,0 00,0 00	100%	30,0 00,0 00	100%	35,000, 000	100%	100,000,000	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	kebakaran																	
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokume n yang Memuat Hasil Kejadian Kebakar an yang Dilakuka n Investiga si Lanjutan Meliputi Penelitia n dan Penguji an dan Penelitia n	4 dokumen	4 dokum en	10,00 0,000	N/A	-	N/A	-	4 dokume n	25,0 00,0 00	4 dokume n	30,0 00,0 00	4 dokume n	35,000, 000	16 dokume n	100,000,000		
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1. Persentase sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah rawan kebakaran; 2. Persentase relawan kebakaran dilatih dan dibentuk 3. Presentase sarana prasarana yang	1. 10% 2. 0 3. 0	1. 10% 2. 0 3. 0	161,5 01,97 6	1. 10% 2. 100% 3. 100%	59,471 ,722	1. 15% 2. 100% 3. 100%	1,120, 000,00 0	1. 20% 2. 100% 3. 100%	1,23 5,00 0,00 0	1. 25% 2. 100% 3. 100%	1,36 2,10 0,00 0	1. 30% 2. 100% 3. 100%	1,507,6 31,000	1. 30% 2. 100% 3. 100%	5,445,704,69 8		

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		disiapkan/diberikan kepada Relawan Kebakaran																	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 orang	0	161,501,976	250 Orang	59,471,722	500 Orang	120,000,000	500 Orang	125,000,000	500 Orang	130,000,000	500 Orang	140,000,000	2250 Orang	735,973,698		
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam	N/A	N/A	0	N/A	-	2 Kelompok	100,000,000	2 Kelompok	111,000,000	2 Kelompok	123,210,000	2 Kelompok	136,763,100	8 Kelompok	470,973,100		

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Dukungan Pemberdaya an Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Dokume n yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kel urahan yang Telah Tersedia Dukunga n Sapr as Damkar	N/A	N/A	0	N/A	-	1 dokume n	900,00 0,000	1 dokume n	999, 000, 000	1 dokume n	1,10 8,89 0,00 0	1 dokume n	1,230,8 67,900	4 dokume n	4,238,757,90 0
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>	Indikator Program :	Tingkat kepuasa n aparatur perangk at daerah terhadap	100%	100%	18,58 6,826, 239	100%	20,445 ,508,8 63	100%	22,490 ,059,7 49	100%	24,7 39,0 65,7 24	100%	27,2 12,9 72,2 97	100%	29,934, 269,52 6	100%	29,934,269,5 26	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		pelayanan kesekretariatan															
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator : 1. Jumlah tahapannya yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1. 12 tahapannya 2. 1 rekomendasi	1. 12 tahapannya 2. 1 rekomendasi	83,44 4,783	93,458 ,157	1. 12 tahapannya 2. 1 rekomendasi	104,67 3,136	1. 12 tahapannya 2. 1 rekomendasi	117, 233, 912	1. 12 tahapannya 2. 1 rekomendasi	131, 301, 982	1. 12 tahapannya 2. 1 rekomendasi	147,05 8,219	1. 12 tahapannya 2. 6 rekomendasi	147,058,219		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	10 dokumen	61,66 8,403	69,068 ,611	10 dokumen	77,356 ,845	10 dokumen	86,6 39,6 66	10 dokumen	97,0 36,4 26	10 dokumen	108,68 0,797	60 dokumen	108,680,797		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	5 dokumen	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen 0	1 dokumen 0	5 dokumen 0	0								
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen 0	5 dokumen 0	0									
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	2 dokumen	2 dokumen 0	1 dokumen 0	5 dokumen 0	0								

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD															
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	7 dokumen 13,311,758	7 dokumen 14,909,169	7 dokumen 16,698,269	7 dokumen 18,702,062	7 dokumen 20,946,309	7 dokumen 23,459,866	35 dokumen 23,459,866							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 dokumen	4 dokumen 8,464,622	4 dokumen 9,480,377	4 dokumen 10,618,022	4 dokumen 11,892,184	4 dokumen 13,319,247	4 dokumen 14,917,556	20 dokumen 14,917,556							

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Perangk at Daerah															
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator : Persentase realisasi anggaran PD	87,97%	90%	9,589, 493,2 62	90%	10,740 ,232,4 53	90%	12,029 ,060,3 48	90%	13,4 72,5 47,5 90	90%	15,0 89,2 53,3 00	90%	16,899, 963,69 6	90%	16,899,963,6 96
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	9,586, 961,0 41	100%	10,737 ,396,3 66	100%	12,025 ,883,9 30	100%	13,4 68,9 90,0 01	100%	15,0 85,2 68,8 02	100%	16,895, 501,05 8	100%	16,895,501,0 58
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokume n Hasil Penyedi aan Administ rasi Pelaksa naan Tugas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksanaan Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokume n Penatau sahaan dan Pengujia n/Verifik asi Keuanga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		n SKPD																	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokume n Koordina si dan Pelaksa naan Akuntan si SKPD	1 laporan	1 lapora n 0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	5 laporan	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 lapora n 0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	5 laporan	0
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa an		Jumlah Dokume n Bahan Tanggap an Pemerik saan dan Tindak	1 berkas	1 berkas 0	1 berkas	0	1 berkas	0	1 berkas	0	1 berkas	0	1 berkas	0	1 berkas	0	5 berkas	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Lanjut Pemerik saan																
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan an/Semesteran SKPD	2 laporan	2 lapora n 2,532, 221	2 laporan	0	2 laporan	0	10 laporan	0								
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokume n Pelapora n dan Analisis Prognosi s Realisasi Anggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		n																
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,6	90	597,1 72,00 0	90	668,83 2,640	90	749,09 2,557	90	838, 983, 664	90	939, 661, 703	90	1,052,4 21,108	90	1,052,421,10 8	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	13 paket	34,50 0,000	6 paket	38,640 ,000	6 paket	43,276 ,800	6 paket	48,4 70,0 16	6 paket	54,2 86,4 18	6 paket	60,800, 788	43 paket	60,800,788	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	33 paket	45,87 0,000	20 paket	51,374 ,400	32 paket	57,539 ,328	32 paket	64,4 44,0 47	32 paket	72,1 77,3 33	32 paket	80,838, 613	181 paket	80,838,613	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Rumah Tangga yang Disediakan																
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	24 paket	150,0 00,00 0	24 paket	168,00 0,000	24 paket	188,16 0,000	24 paket	210, 739, 200	24 paket	236, 027, 904	24 paket	264,35 1,252	144 paket	264,351,252	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	10 paket	42,59 0,000	10 paket	47,700 ,800	10 paket	53,424 ,896	10 paket	59,8 35,8 84	10 paket	67,0 16,1 90	10 paket	75,058, 132	60 paket	75,058,132	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1080 buah	792 buah	5,000, 000	796 buah	5,600, 000	796 buah	6,272, 000	796 buah	7,02 4,64 0	796 buah	7,86 7,59 7	796 buah	8,811,7 08	4772 buah	8,811,708	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/M	30 paket	22 paket	32,47 2,000	25 paket	36,368 ,640	25 paket	40,732 ,877	25 paket	45,6 20,8	25 paket	51,0 95,3	25 paket	57,226, 759	147 paket	57,226,759	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			aterial yang Disediak an									22		21				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjung an Tamu	4 laporan	4 lapora n 28,94 0,000	4 laporan 32,412 ,800	4 laporan 36,302 ,336	4 laporan 40,6 58,6 16	4 laporan 45,5 37,6 50	4 laporan 51,002, 168	24 laporan 51,002,168							
	Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyele nggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	12 laporan	12 lapora n 257,8 00,00 0	12 laporan 288,73 6,000	12 laporan 323,38 4,320	12 laporan 362, 190, 438	12 laporan 405, 653, 291	12 laporan 454,33 1,686	72 laporan 454,331,686							
	Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokume n Penatau sahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokume n Dukung an Pelaksa naan Sistem Pemerint ahan Berbasis	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Elektronik pada SKPD																
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator : Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	41 unit	14 unit	750,000,000	20 unit	252,000,000	100 unit	1,132,240,000	30 unit	1,461,108,800	50 unit	354,041,856	36 unit	396,526,879	250 unit	396,526,879	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1 unit	500,000,000	0	0	0	0	1 unit	680,000,000	0	0	0	0	2 unit	1,180,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	0	-	0	0	0	0	10 unit	390,000,000	0	0	0	0	10 unit	390,000,000	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediak an	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkuta n Darat Tak Bermoto r yang Disediak an	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediak an	N/A	1 paket	25,00 0,000	0	0	18 paket	850,00 0,000	0	0	18 paket	0	0	0	37 paket	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralata n dan Mesin Lainnya yang Disediak an	41 unit	11 unit	225,0 00,00 0	12 unit	252,00 0,000	13 unit	282,24 0,000	15 unit	316, 108, 800	16 unit	354, 041, 856	18 unit	396,52 6,879	85 unit	396,526,879
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediak an	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwuj d yang Disedi ak an	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Disedi ak an	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Disedi ak an	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		Jumlah Unit Sarana dan Prasaran a	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1 unit	75,0 00,0 00	N/A	-	N/A	-	N/A	-

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Bangunan Lainnya			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indikator : Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	100%	2,584, 188,8 00	100%	2,842, 607,68 0	100%	3,126, 868,44 8	100%	3,43 9,55 5,29 3	100%	3,78 3,51 0,82 2	100%	4,161,8 61,904	100%	4,161,861,90 4
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Surat Menyura t	12 laporan	12 lapora n	1,980, 000	12 laporan	2,178, 000	12 laporan	2,395, 800	12 laporan	2,63 5,38 0	12 laporan	2,89 8,91 8	12 laporan	3,188,8 10	72 laporan	3,507,691
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 laporan	12 lapora n	362,0 00,00 0	12 laporan	398,20 0,000	12 laporan	438,02 0,000	12 laporan	481, 822, 000	12 laporan	530, 004, 200	12 laporan	583,00 4,620	72 laporan	641,305,082

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Disedi an																
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor		Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Peralata n dan Perleng kapan Kantor yang Disedi an	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor yang Disedi an	12 laporan	12 lapora n	2,220, 208,8 00	12 laporan	2,442, 229,68 0	12 laporan	2,686, 452,64 8	12 laporan	2,95 5,09 7,91 3	12 laporan	3,25 0,60 7,70 4	12 laporan	3,575,6 68,474	72 laporan	3,933,235,32 2
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indikator Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	39 unit	44 unit	345,0 00,00 0	50 unit	540,40 0,000	50 unit	612,24 8,000	55 unit	691, 517, 760	60 unit	784, 099, 891	65 unit	975,99 1,878	323 unit	810,991,878

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	0	0	5 unit	65,000 ,000	5 unit	72,800 ,000	5 unit	81,5 36,0 00	5 unit	91,3 20,3 20	5 unit	102,27 8,758	25 unit	102,278,758
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasio nal atau Lapangan yang Dipelihar a dan dibayark an Pajak dan Perizina nnya	32 unit	36 unit	125,0 00,00 0	36 unit	140,00 0,000	60 unit	156,80 0,000	60 unit	175, 616, 000	60 unit	196, 689, 920	60 unit	220,29 2,710	312 unit	220,292,710
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihar a dan dibayark an	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Perizina nnya																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkuta n Darat Tak Bermoto r yang Dipelihar a dan Dibayark an Perizina nnya	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
	Pemeliharaa n Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihar a	N/A	N/A	0														
	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralata n dan Mesin Lainnya yang dipelihar a	7 unit	6 unit	50,00 0,000	10 unit	95,000 ,000	10 unit	106,40 0,000	15 unit	119, 168, 000	20 unit	133, 468, 160	25 unit	149,48 4,339	86 unit	149,484,339		
	Pemeliharaa n Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihar a	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	170,000,000	1 unit	190,400,000	2 unit	213,248,000	2 unit	238,837,760	2 unit	267,498,291	2 unit	299,598,086	10 unit	299,598,086
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	0	0	1 paket	25,000,000	1 paket	28,000,000	1 paket	31,360,000	1 paket	35,123,200	1 paket	39,337,984	5 paket	39,337,984
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	N/A	N/A	0	1	25,000,000	1	35,000,000	1	45,000,000	1	60,000,000	4	165,000,000	N/A	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi															
	Pemeliharaa n/Rehabilitas i Tanah		Luas Tanah yang Dilakuka n Pemelih araan/R ehabilita si	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indikator : Persentase ASN yang disiplin	90%	90%	0	90%	198,00 0,000	90%	221,76 0,000	90%	498, 371, 200	90%	278, 175, 744	90%	561,55 6,833	90%	811,556,833
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningk atan Sarana dan Prasaran a Disiplin Pegawai	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an	33 paket	0	0	0	0	0	0	66 paket	0	0	0	0	0	66 paket	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n		Jumlah Dokume n Pendata an dan Pengola han Administ rasi Kepega waian	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaia n		Jumlah Dokume n Hasil Koordina si dan Pelaksa naaan Sistem Informas i Kepega waian	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokume n Monitori ng, Evaluasi, dan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penilaian Kinerja Pegawai																
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	100 orang	250,000,000	0	0	100 orang	250,000,000	200 orang	500,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	0	0	0	100 orang	198,000,000	100 orang	221,760,000	100 orang	248,371,200	100 orang	278,175,744	100 orang	311,556,833	500 orang	311,556,833	

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Indikator : 1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	0	1. 100% 2. 100%	0	1. 100% 2. 100%	0	1. 100% 2. 100%	0	1. 100% 2. 100%	0	1. 100% 2. 100%	0	1. 100% 2. 100%	0
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokume n Pengam anan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD															
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0										
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0										

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output )/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0								
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0								

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

---

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan pada sub urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sehingga penetapan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Tahun 2021-2026 adalah untuk menunjang tercapainya Visi Kabupaten Sidoarjo, yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”***.

Implementasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung Visi Kabupaten Sidoarjo mendukung Misi Ke-3 yaitu *“Membangun Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Modern Dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan”*, Sasaran ke-2 yaitu *“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemanangan Terhadap Bencana”*, yang dijabarkan melalui rumusan Tujuan dan Sasaran pada BAB IV Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka ditetapkan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagai alat ukur untuk memantau tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, dalam rangka pencapaian rumusan Tujuan dan Sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, dengan Indikator yang ditetapkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 23. Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Indeks Resiko Bencana (IRB)	112,82	104,72	98,44	92,53	86,98	81,76	76,85	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	0,68	0,7	0,72	0,76	0,81	0,86	0,91
2. Rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran	22,3 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	41,54%	55,00%	55%	60%	65%	70%	75%
									Persentase penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## PENUTUP

---

Review Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidoarjo merupakan review penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan oleh seluruh aparat BPBD Kabupaten Sidoarjo setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyesuaian / *review* yang searah dengan kebijakan / prioritas pembangunan pusat / daerah. Oleh karena itu, kami berupaya untuk memperbaiki kualitas dokumen Rencana Strategis ini dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Review Rencana Strategis diperlukan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah, serta menunjang terwujudnya visi misi Kepala Daerah terpilih sesuai sub urusan / kewenangan yang ditangani.

Review Rencana Strategis diperlukan sebagai pedoman dalam penentuan arah kebijakan strategis agar capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terwujud dan terukur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, Saran, masukan dan evaluasi yang membangun sangat kami harapkan dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan ini.

Demikian penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana , kebakaran dan penyelamatan yang konsisten, sinergis, proporsional dan komunikatif sesuai tugas dan fungsi yang diemban BPBD dan upaya peningkatan layanan kepada *stakeholder*

Sidoarjo, April 2022

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Sidoarjo



**Ir. DWIDJO PRAWITO, M. MT.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196510121992021001